



Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purbalingga

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA 2027

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purbalingga

 <https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id/>
 dinkominfo@purbalinggakab.go.id
 Jalan Letkol Isdiman No. 17A, Purbalingga 53313



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Jl Letkol Isdiman No. 17A Telp.(0281) 8902091 Fax.(0281) 8902091
PURBALINGGA – 53313 e-mail : dinkominfo@purbalinggakab.go.id**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA**

NOMOR : 050.1.2/00045/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA TAHUN 2027 DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURBALINGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
PURBALINGGA,**

- Menimbang : a. Berdasarkan Pasal 11 ayat 3, Pasal 16 ayat 2 dan Pasal 125 poin a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, menegaskan bahwa Perangkat Daerah Menyusun Renja Perangkat Daerah yang memuat program, dan kegiatan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra dan RKPD;
- b. Bahwa dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun perlu disusun Renja Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga tentang Pembentukan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Estándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
13. Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 85);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja Tahun 2027) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dengan susunan Tim sebagaimana terlampir;

KEDUA : Tugas Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja Tahun 2027) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga sebagaimana diktum KESATU adalah :

1. Menyusun agenda kerja Tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
2. Mengkaji dan Mengevaluasi Renja Tahun n-2 termasuk capaian dan kemajuannya;
3. Mengkoordinasikan dan Menyusun Rancangan Awal, Rancangan, dan Rancangan Akhir Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2027;
4. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait;
5. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan data yang diperlukan antar bidang sebagai bahan penyusunan;
6. Mengkoordinasikan dan Menyusun Rancangan dan Rancangan Akhir Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2027;

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Purbalingga
Pada tanggal : 1 Desember 2025

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA**



Ditandatangani secara elektronik oleh:

R. BUDI SETIAWAN, SE., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19750417 201001 1 011

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga
Nomor : 050.1.2/00045/2025
Tanggal : 1 Desember 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENJA TAHUN 2027
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	R. BUDI SETIAWAN, SE., M.Si.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua
2.	Baryati, S.Kom.	Plt. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris I
3.	Marlin Dwi Sulandari, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris II
4.	Baryati, S.Kom.	Kepala Bidang Informatika	Anggota
5.	Sapto Suhardiyo, S.STP, ST.	Kepala Bidang Infrastruktur, Teknologi Informasi Komunikasi, Statistik dan Persandian	Anggota
6.	Warkhan Agus, S.IP., M.Si.	Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik	Anggota
7.	Mely Rahmawati, SE., MM.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Luky Hidayat, S.T., M.Eng.	Sub Koordinator/Fungsional Manggala Informatika Ahli Muda	Anggota
9.	Eko Wahyu Cahya, S.Kom.	Sub Koordinator/Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
10.	Dra. Jeni Preandini, M.Si.	Sub Koordinator/Fungsional Statistisi Ahli Muda	Anggota

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
11.	Hanifah Khairunnisa Shofiati, ST	Sub Koordinator/Fungsional Sandiman Ahli Pertama	Anggota
12.	Edy Sumartono, S.H.	Sub Koordinator/Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
13.	Lejar Hatininggar, S.Sos	Sub Koordinator/Fungsional Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
14.	Riyang Herlambang, S.Kom.	Sub Koordinator/Fungsional Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
15.	Khoizah Daika, S.M	Staf Perencana & Keuangan	Anggota
16.	Tris Dianasari, S.Si.	Fungsional Ahli Pertama- Statistisi	Anggota

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA**



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

R. BUDI SETIAWAN, SE., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19750417 201001 1 011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Purbalingga adalah dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinkominfo Kabupaten Purbalingga. Renja disusun berpedoman kepada 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen pedoman yang dimaksud diantaranya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2027 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan Rancangan Awal RKPD, pelaksanaan forum Dinas Komunikasi dan Informatika, hingga pada penyempurnaan berdasarkan Peraturan Bupati tentang RKPD. Proses ini mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) SKPD mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada SKPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Penyusunannya juga berpedoman pada Renja Kementerian/Lembaga terkait dan Renja Dinkominfo Provinsi terkait.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinkominfo sebagai dokumen perencanaan tahunan disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan

pengawasan. Serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Selain itu juga sebagai implementasi pelaksanaan Rencana strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung visi dan misi Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

- 1 Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang telah diubah menjadi PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Mmabahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- 2 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
- 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 6 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 50 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Purbalingga tahun 2005;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang klarifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keunagan Daerah;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No, 12 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga (RPJMD) 2021-2026;
- 9 Surat Keputusan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah kabupaten Purbalingga;
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Berbasis Elektronik (SPBE);
- 11 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

13 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

- 1 Menentukan arah kebijakan pembangunan komunikasi, informasi publik, informatika, infrastruktur TIK, statistik dan persandian tahun 2027;
- 2 Mewujudkan rencana program dan kegiatan prioritas Pembangunan komunikasi, informasi publik, informatika, infrastruktur TIK, statistik dan persandian tahun 2027 yang sinergis dalam rangka mencapai target RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

- 1 Memberikan landasan operasional bagi unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- 2 Menjabarkan renstra Dinkominfo Tahun 2025-2030 sekaligus sinkronisasi dengan kebijakan dan sasaran rencana kerja Pemerintah Daerah;
- 3 Pedoman/acuan bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan kegiatan tahun 2027;
- 4 Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
- 5 Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan komunikasi, informasi publik, informatika, infrastruktur TIK, statistik dan persandian antar wilayah dan antar tingkat pemerintahan (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan regional dan nasional.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rancangan Awal Renja Perubahan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga mengacu sistematika sebagaimana pedoman Permendagri No 86 Tahun 2017, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PADA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Pada Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Dearah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PADA TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PADA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rancangan Awal Rencana Kerja 2027 secara umum berisi capaian kinerja program dan kegiatan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 sebagai penjabaran Rencana Srategis Dinkominfo Kabupaten Purbalingga 2025–2030. Secara umum capaian kinerja program dan kegiatan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga tahun 2025 dapat dilaksanakan dan mendekati bahkan ada yang melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga merupakan SKPD yang disahkan melalui Perda No. 12 Tahun 2016 sebagai pelaksana urusan wajib.

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan 5 Program dan 14 kegiatan dan 33 Sub Kegiatan. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan 5 program dan 13 kegiatan dan 35 Sub Kegiatan.

Pada Anggaran Murni Tahun 2025 sebelum adanya efisiensi memiliki 5 Program, 13 kegiatan yang terbagi menjadi 33 Sub Kegiatan dengan Anggaran secara keseluruhan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 8.545.6.000,- (Delapan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah). Anggaran Perubahan Tahun 2025 pada Dinkominfo Kab. Purbalingga mengalami penurunan sejumlah Rp. 443.540.000,- atau sebesar 5,19% dari Anggaran Murni 2025. Jika dilihat dari komposisi, secara garis besar realisasi belanja Dinkominfo pada Tahun 2025 dapat dilihat sesuai dengan grafik berikut ini:



Anggaran Perubahan pada Tahun 2025 memiliki 5 Program, 13 kegiatan yang terbagi menjadi 33 Sub Kegiatan dengan Anggaran secara

keseluruhan Tahun 2025 adalah sebesar **Rp8.102.226.000,-** (Delapan Milyar Seratus Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah). Anggaran Perubahan Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan dari Anggran Murni 2025, dikarenakan adanya efisiensi berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor: 903/3008 tanggal 17 Februari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Adapun format matrik rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga sampai dengan akhir Desember tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinkominfo Tahun 2025
Kabupaten Purbalingga

[illegible]

						administrasi umum dan jasa penunjang, dengan indikator kinerja: Persentase pemenuhan layanan kepegawaian, administrasi umum, dan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah											
2	16	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	16	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	16	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	16	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	16	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	16	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	16	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	16	02			Program Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	16	02	2,01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Media Komunikasi Publik (Radio, Website, Medsos, Media Luar Ruang) Milik Pemerintah Daerah yang Dikelola Maupun Dimanfaatkan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	16	03			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Pelayanan Publik yang menggunakan aplikasi informatika terhadap Aplikasi yang Dikelola	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	16	03	2,01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nama Domain dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terkelola	Dokumen	1	1	1	1	100%	1	1	1	100%	100%

[illegible]

Dari tabel capaian indikator kinerja program yang mendukung sasaran Dinkominfo dapat diterangkan sebagai berikut:

Berdasarkan dokumen APBD Awal dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar **Rp.8.102.226.000,-** dengan realisasi **Rp.7.637.149.767,-** persentase **(94,26%)**.



Capaian kinerja keluaran pada masing-masing program, kegiatan sampai sub kegiatan di setiap urusan hamper seluruhnya mencapai realisasi di atas 80%, namun hanya 2 sub kegiatan yang realisasinya di bawah 80% yaitu sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan persentase realisasi 72,85% dan sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah dengan realisasi 10,31% dikarenakan ada anggaran pokok sejumlah Rp.100.000,00 yang tidak dapat dilaksanakan. Keseluruhan penjelasan sub kegiatan dan aktivitasnya dapat dijabarkan di bawah ini:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini adalah merupakan program penunjang pelaksanaan kegiatan yang ada pada setiap perangkat daerah realisasi pelaksanaan program dimaksud untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas yang meliputi kegiatan: pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, sarana prasarana kantor, koordinasi dan konsultasi dan dokumentasi, diklat serta penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja OPD.

Proses perencanaannya melalui inventarisasi kebutuhan internal OPD dan dimuat dalam RPJMD/RKPD/Renja OPD/RKA OPD/RKAP OPD/DPA OPD/DPPA OPD Tahun 2025. Bentuk kegiatannya meliputi:

1.1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah.

Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud meliputi sub kegiatan:

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Aktifitasnya adalah penyusunan dokumen Rencana strategis (Renstra) OPD tahun 2025–2029 dan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2027. Alokasi anggaran Rp1.355.000,- realisasi sebesar Rp1.354.800,- (99,99%). Realisasi fisik 100%.

Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Aktifitasnya adalah Penyusunan Laporan LKPJ, LKJIP, LKD, dan Laporan Bulanan. Alokasi anggaran Rp1.244.000,- realisasi sebesar Rp1.243.300,- (99,940%). Realisasi Fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

1.2. Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah

Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud meliputi sub kegiatan:

a. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Aktifitasnya adalah pengelolaan honor pejabat penatausahaan keuangan (Pegawai anggaran PPTK, Bendahara, Pembantu Bendahara Pengeluaran, staf admin). Alokasi anggaran Rp34.122.000,- realisasi Rp34.121.000,- (100%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Aktifitasnya adalah pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan ASN. Alokasi anggaran Rp5.146.720.000,- realisasi Rp4.877.182.627,- (91.93%). Realisasi fisik 100%. Silpa ini merupakan earmark sehingga permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

c. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN

Aktifitasnya adalah pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan ASN. Alokasi anggaran Rp28.452.000,- realisasi Rp28.393.718,- (99.80%). Realisasi fisik 100.00%. Silpa ini merupakan earmark sehingga permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan :

a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Aktifitasnya adalah perbaikan Laptop dan Printer untuk kedinasan. Alokasi anggaran Rp1.970.000,- realisasi Rp1.970.000,- (100%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

1.4. Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah

Pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah melalui sub kegiatan :

a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Aktifitasnya adalah iklan di media cetak dan media online, pencetakan baligho, pencetakan leaflet, spanduk dan biaya perjalanan dinas luar daerah study banding, alokasi anggaran Rp90.000.000,- realisasi Rp90.000.000,- realisasi fisik 100%, persentase anggaran 100%.

1.5.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Aktifitasnya adalah pembelian Lampu, kabel, batu baterai Alokasi anggaran Rp2.000.000,- realisasi Rp2.000.000,- (100%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Aktifitasnya adalah belanja Bahan-Isi Tabung Gas kantor dan Alat Tulis Kantor, Kertas Cover, Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Perabot Kantor, Alat/Bahan Suvenir/Cendera Mata dan Pembayaran Retribusi Sampah dengan alokasi anggaran Rp10.654.000,- realisasi Rp9.858.000,- (92,53%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

ktifitasnya adalah Jamuan makan minum rapat, jamuan makan minum tamu kedinasan dan makan minum rapat dinas Alokasi anggaran Rp2.680.000,- realisasi Rp2.680.000,- (100%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil , kondisi sarana prasarana memadai.

d. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Aktifitasnya adalah Honorarium pengelola SIM ASET, honorarium Pengelola SIMDA, dan Honorarium Pengelola SIPD Koordinator Operator SKPD. Alokasi anggaran Rp1.885.000,- realisasi Rp1.885.000,- (100%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

1.6.Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan :

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Aktifitasnya adalah pengadaan 4 unit laptop untuk mendukung operasional Bidang ITIKSP. Alokasi anggaran Rp55.000.000,- realisasi Rp54.723.000,- (99,50%). Realisasi fisik 100% untuk mendukung operasional Bidang ITIKSP. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.



1.7.Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Aktifitasnya adalah pembelian materai untuk kepentingan dinas. Alokasi anggaran Rp0.000,- realisasi Rp0.000,- (0,00%). Realisasi fisik 0%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai. Hal ini karena pada anggaran perubahan 2025 anggaran sub kegiatan ini di-nol kan dari Bappelitbangda.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Aktifitasnya adalah Pembayaran rekening telepon, PDAM dan listrik untuk kepentingan dinas. Alokasi anggaran Rp.55.374.000,- realisasi Rp40.337.975,- (72,85%), hal ini terjadi karena adanya penghematan pemakaian telepon, listrik, dan air, sehingga jumlah tagihan yang diterima lebih kecil dibandingkan dengan jumlah biaya yang sudah dianggarkan. Realisasi fisik 100%. Permasalahan pelaksanaan tergantung pemakaian daya listrik , air dan telepon kantor, sehingga sisa anggaran yang ada sebagai penghematan anggaran, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Aktifitasnya adalah Pembayaran untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor dan belanja sewa alat kantor lainnya-sewa pakaian pengiring (untuk acara peringatan HUT RI). Alokasi anggaran Rp1.000.000,- realisasi Rp1.000.000,- (100%). Realisasi fisik 100

% . Permasalahan pelaksanaan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Aktifitasnya adalah untuk Pembayaran tenaga kebersihan, keamanan, pengemudi dan THL. Alokasi anggaran Rp416.980.000,-. Realisasi Rp411.025.074,- (98,57%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

1.8.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan :

a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional/lapangan

Aktifitasnya adalah belanja service dan penggantian suku cadang kendaraan dinas kendaraan roda 4 sebanyak 6buah, kendaraan roda 2 sebanyak 10 buah, pajak kendaraan. Alokasi anggaran Rp126.192.000,- realisasi Rp126.178.500,- (99,99%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.



b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Aktifitasnya adalah pemeliharaan Service AC, Komputer/Laptop dan Printer. Alokasi anggaran Rp3.491.000,- realisasi Rp3.491.000,- (100%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Aktifitasnya adalah pemeliharaan perbaikan keramik, perbaikan bocor atap, perbaikan engsel pintu alokasi anggaran Rp2.000.000,- realisasi Rp2.000.000,- (100%). Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini dimaksudkan untuk pengelolaan informasi dan peningkatan pelayanan

publik bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Purbalingga, yaitu melalui Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Pelayanan Informasi Publik, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penyelenggaraan Hubungan masyarakat (terbentuknya PPID Pembantu), media dan Kemitraan Komunitas (terbentuknya KIM) Realisasi pelaksanaan program dimaksud untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas dan keterbukaan informasi publik dengan sasaran meningkatkan implementasi e-Government dan keterbukaan informasi publik.

Proses perencanaannya melalui inventarisasi kebutuhan internal OPD dan dimuat dalam RPJMD/RKPD/Renja OPD/RKA OPD/DPA/DPPA OPD tahun 2025. Bentuk kegiatannya meliputi :

2.1.Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan:

a. Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Total anggaran sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik pada tahun 2025 adalah Rp467.244.000,- dengan total realisasi adalah Rp 467.184.333,- atau sebesar 80,73%. Secara garis besar, pelaksanaan realisasi anggaran dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1. Realisasi Belanja Cetak Baliho, Backdrop, Banner, dan Kalender Tahun 2025 pada rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor (5.1.02.01.01.0024)

Anggaran APBD-P : Rp 249.451.000,-
Realisasi : Rp 249.419.700,- (99,9%)

No.	Uraian	Realisasi Belanja	Keterangan
1	Cetak dan Pasang Baliho, Backdrop Upacara, dan Banner/Spanduk	Rp 208.712.200,-	56 tema publikasi, 157 lembar cetak
2	Pembuatan Kalender Tahun 2026 (2500 buah)	Rp 40.000.000,-	Spesifikasi ukuran 38 cm x 53 cm, kertas Artpaper 150 gr ,7 lembar full colour, finishing klem atas
3	Alat Tulis Kantor (Fotocopy, Jilid, Stopmap, Ballpoint, dll)	Rp 707.500,-	Penunjang administrasi

- 2. Realisasi Belanja Pemotretan Bupati/Wakil Bupati dan Publikasi Iklan Media Tahun 2025 pada rekening Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (5.1.02.02.01.0055)

Anggaran APBD-P : Rp 111.500.000,-
Realisasi : Rp 111.490.000,- (99,9%)
Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi Belanja	Keterangan
1	Pemotretan Bupati dan	Rp.9.990.000,-	Foto Bupati/Wakil

	Wakil Bupati		Bupati beserta Istri dengan 14 stel baju, dan pembuatan Desain Foto Resmi (cetak dinding).
2	Iklan Publikasi Media Cetak (Suara Merdeka dan Radar Banyumas)	Rp.48.750.000,-	38 kali publikasi
3	Iklan Publikasi Media Online (Serayunews, Disway, Tabloidelemen, Aspirasi-news)	Rp.52.750.000,-	48 kali publikasi

4. Belanja Lembur :
- Raealisasi anggaran adalah Rp 10.610.000,00 atau sebesar 99,91% dari anggaran sebesar Rp.10.620.000,00
 - Anggaran belanja lembur hanya cukup digunakan sampai dengan bulan Agustus (8 bulan).

b. Pelayanan Informasi Publik

Aktifitasnya tahun 2025 berupa Honorarium tim pelaksana kegiatan Dewan Direksi Radio, Dewan Pengawas Radio, jasa tenaga ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, tenaga pelayanan umum, Belanja tagihan telepon, air, listrik, langganan streaming Radio dan WA Blast, pembayaran IPP, ISR/Ijin Spektrum Radio, dan Jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi non ASN. Alokasi anggaran Rp366.985.000,- realisasi Rp261.107.693,- (71,15%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai. Ketidakterserapan maksimal anggaran di sub kegiatan ini karena adanya anggaran pikir untuk kajian Perda Keterbukaan Informasi Publik dari anggota DPRD Kabupaten Purbalingga yang dianggarkan di sub kegiatan ini namun tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Usulan Perda tersebut belum selesai dan masih dalam proses di Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan Pelayanan Informasi Publik sebagian besar digunakan untuk kegiatan LPPL Radio Gema Soedirman, yang terdiri dari:

- Membayar gaji dan jaminan/asuransi untuk 8 orang penyiar LPPL RGS, 1 orang tenaga keamanan, dan 1 orang tenaga kebersihan.
- Membayar tagihan air, listrik, langganan streaming radio, dan ISR (izin spektrum radio). Sedangkan untuk **Belanja Tagihan Telepon** realisasinya 0% karena **LPPL RGS beralih ke medsos tidak berlangganan telepon lagi.**
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa.
 - Digunakan untuk perjalanan dinas keluar kota yang berkaitan dengan FK Metra, Kontributor Berita Daerah Se-Jateng, Bintek.
- Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-PeralatanStudio Video dan Film

- Belanja pemeliharaan alat audio/studio berupa penggantian spare part Drone DJI Mini 2. Belanja Pemeliharaan Alat audio/studio berupa spare part Flexible Mavix Mini 2. Belanja pemeliharaan alat audio/studio berupa spare part mounting lensa dan biaya transfer

c. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Aktifitasnya pada sub kegiatan ini adalah penguatan kapasitas dengan pembentukan PPID Pembantu dan pembinaan PPID Pembantu, jumlah PPID Pembantu 27 OPD, Dinkominfo sebagai sekretaris PPID Utama.

Total anggaran sub kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik pada tahun 2025 adalah Rp 12.155.000,00 dengan total realisasi adalah Rp 12.146.800,00 atau sebesar 99,93%. Secara garis besar, pelaksanaan realisasi anggaran dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat :
 - Realisasi anggaran sebesar Rp 2.640.000,00 (100%)
 - Anggaran ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Mengikuti Tes Kompetensi PPID yang dilaksanakan oleh Plt. Kepala Dinkominfo selaku PPID Kabupaten Purbalingga, Sadono, S.Sos., M.Si. pada hari Senin, 13 Oktober 2025, Visitasi Monev PPID (Selasa, 28 Oktober 2025), Sosialisasi PPID (Rabu, 19 Maret 2025 dan Selasa, 28 Oktober 2025), dan Rapat Evaluasi PPID (20 Desember 2024).
2. Belanja perjalanan dinas biasa:
 - Realisasi Rp.5.025.000,00 (100%)
 - Uji Publik yang dihadiri langsung oleh Bupati Purbalingga, H. Fahmi Muhammad Hanif dan Kepala Dinkominfo selaku PPID Kabupaten Purbalingga, R. Budi Setiawan, S.E., MSi. dengan Panelis 1: Setiawan Hendra Kelana, S.Kom. (KIP Jawa Tengah), Panelis 2: Prof. Dr. Ir. Sri Puryono K.S., M.P. (Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah 2014-2019), dan Panelis 3: Dr. Nanik Qosidah, S.E., M.Ak. (APINDO Jawa Tengah) di Ruang A BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Semarang pada hari Selasa, 25 November 2025.
 - malam penghargaan KIP Award (16 Desember 2025)



2. Belanja Honorarium Narasumber:

- Realisasi anggaran sebesar Rp 2.350.000,00 (100%)
- Digunakan untuk keperluan honor narasumber Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada kegiatan Sosialisasi PPID

Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

d. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

Aktifitasnya pada sub kegiatan ini adalah pembentukan dan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tahun 2025 jumlah 14 kelompok KIM dan 1 kali pertunjukan rakyat, 1 konten youtube, dan 1 buah film pendek. Alokasi anggaran Rp22.113.000,- realisasi Rp22.113.900,- (100%) fisik 100%, permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.



Belanja pada kegiatan KIM dan FK Metra/Forum Komunikasi Media Tradisional ini antara lain berupa Jasa dekor panggung pertunjukan FK Metra, Jasa iklan

(Pembuatan Film Pendek KIM Cadas dg tema Waspada Judi Online dengan judul REMUK JUJUG), Sewa Pakaian Tari FK Metra, makan dan minum rapat kegiatan FK Metra mulai dari persiapan hingga pentas, serta pembuatan film pendek KIM, sewa gamelan pentas pertunjukan rakyat FK Metra Tahun 2025, perjalanan dinas luar daerah seperti Bimtek KIM di Pekalongan, Workshop Produksi Konten Jurnalistik bersama KPK, Penghargaan FK Metra dan KIM.

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan Perangkat Daerah. Perangkat Daerah hingga pemerintahan desa mengembangkan aplikasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Program ini menjadi wadah penciptaan inovasi-inovasi dan pengembangan inovasi pelayanan perangkat daerah hingga pemerintahan desa. Realisasi pelaksanaan program dimaksud untuk membantu kelancaran. Proses perencanaannya melalui inventarisasi kebutuhan internal OPD dan dimuat dalam RPJMD/RKPD/Renja OPD/RKA OPD/DPA/DPPA OPD tahun 2025. Bentuk kegiatannya meliputi:

3.1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan:

a. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah domain dan sub domain berdasarkan klasifikasi yang dikelola oleh DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. 1 domain utama **purbalinggakab.go.id** sebagai identitas resmi Pemerintah Daerah;
2. 185 subdomain untuk website perangkat daerah yang berfungsi sebagai sarana keterbukaan informasi publik;
3. 230 domain atau subdomain yang digunakan untuk aplikasi dan layanan berbasis elektronik; serta
4. 41 domain khusus pemerintahan desa dengan ekstensi **desa.id** sebagai identitas digital desa.



Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta subdomain di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan untuk menjamin tertib administrasi, keamanan informasi, dan keberlanjutan layanan berbasis website resmi pemerintah daerah.

Dalam rangka memastikan pemanfaatan keempat kategori domain tersebut berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan pendataan, pengelolaan, dan pengawasan secara terintegrasi. Upaya tersebut ditujukan untuk mendukung keterbukaan informasi publik, meningkatkan integrasi layanan aplikasi dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta memperkuat tata kelola dan identitas digital pemerintahan desa

.Adapun aktivitas yang dilaksanakan pada sub kegiatan Pengelolaan nama domain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga meliputi:

1. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pelatihan Pengelolaan Website bagi Perangkat Daerah,
2. Rapat koordinasi pengelolaan pengaduan dengan instansi vertikal,
3. Rapat monitoring dan evaluasi pengelolaan pengaduan dengan narasumber Dosen Komunikasi UIN ZAISU,
4. Membayar biaya langganan WhatsApp API Gateway untuk digunakan pada Aplikasi Kepenak Ngodene,
5. Belanja lisensi SSL, Google DNS serta
6. Koordinasi pengelolaan nama domain desa.id

Kegiatan ini didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp19.100.000,- dan telah

direalisasikan sepenuhnya sebesar Rp19.100.000,- atau mencapai 100%. Realisasi fisik kegiatan juga tercapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Selama pelaksanaan kegiatan tidak terdapat permasalahan yang berarti, sehingga tidak diperlukan langkah solusi khusus. Kondisi sarana dan prasarana pendukung dinilai memadai untuk menunjang pelaksanaan kegiatan secara optimal

3.2. Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan:

a. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga mengelola Jaringan Intra Pemerintah Daerah (JIP) sebagai sarana penghubung antar-OPD. Jaringan ini mencakup distribusi koneksi data dan integrasi aplikasi berbasis internet maupun intranet. JIP menjadi jalur utama dalam mengakses aplikasi strategis pemerintah daerah, seperti aplikasi keuangan, perizinan, pengaduan masyarakat, serta layanan administrasi pemerintahan lainnya.

Jaringan internet dan intranet Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyediakan internet untuk 27 OPD, serta mendukung penyediaan wifi publik di lokasi-lokasi strategis, yaitu:

Tabel 2.2 Jaringan Internet Pada Fasilitas umum dan Taman

No	Fasilitas Umum dan Taman	<u>Bandwith</u>
1.	Mal Pelayanan Publik (MPP)	100 Mbps
2.	Alun Alun Purbalingga	100 Mbps
3.	Purbalingga Food Center (PFC) & Gor	100 Mbps
4.	Pasar Segamas	100 Mbps
5.	Pasar Bukateja	100 Mbps
6.	Kampung Digital Griya UMKM	100 Mbps

Aktivitas pada sub kegiatan ini merupakan **belanja jasa dan pengadaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi** yang mendukung operasional jaringan, layanan internet, pusat data, serta penguatan infrastruktur Smart City dan SPBE di Kabupaten Purbalingga. Aktivitas mencakup belanja jasa tenaga teknologi informasi (Network Administrator), penyediaan bandwidth dan langganan internet, langganan lisensi dan IP address, serta pengadaan dan pemeliharaan perangkat jaringan, server, dan sistem pendukung daya (power backup server).

Selain itu, kegiatan juga meliputi **penguatan infrastruktur jaringan fiber optik**, pengelolaan server dan co-location, pemeliharaan jaringan telepon, serta dukungan peralatan studio audio dan film untuk kebutuhan komunikasi dan diseminasi informasi pemerintah daerah.

Pelaksanaan kegiatan didukung dengan berbagai **rapat koordinasi, evaluasi, monitoring, pelatihan, dan kegiatan pendukung Smart City, SPBE, dan TP2DD**, baik di dalam daerah maupun luar daerah, guna memastikan integrasi sistem, peningkatan kapasitas SDM, dan keberlanjutan layanan digital pemerintah daerah.

Secara rinci, aktivitas yang dilaksanakan meliputi:

1. Pengadaan perangkat dan material jaringan, antara lain modem ONT ZTE, kabel fiber optik (1 core dan 24 core), tiang fiber optik, HDMI fiber optic cable, serta perangkat jaringan aktif.
2. Instalasi dan penarikan kabel fiber optik antara Setda dan Dinas Kominfo.
3. Pengadaan peralatan server dan jaringan, meliputi enterprise server, CPU, memori server, router core, dan access point.
4. Pengadaan peralatan studio audio dan film untuk mendukung produksi konten dan layanan informasi publik.
5. Belanja pemeliharaan jaringan telepon dan jaringan data.
6. Pelaksanaan rapat koordinasi, evaluasi, monitoring dan evaluasi (monev), pelatihan keamanan website dan domain, serta keikutsertaan dalam forum nasional dan kegiatan koordinasi lintas instansi terkait Smart City, SPBE, TP2DD, ETPD, dan inovasi daerah

Aktifitasnya ini didukung dengan **alokasi anggaran sebesar Rp1.036.423.000,-** dengan **realisasi sebesar Rp1.031.200.515,- atau 99,50%**, serta **realisasi fisik mencapai 100%**. Seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai perencanaan, **tanpa kendala (permasalahan nihil)**, sehingga **tidak diperlukan langkah solusi khusus**. Kondisi sarana dan prasarana pendukung dinilai **memadai dan berfungsi optimal** dalam mendukung layanan teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

b. Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah

Pada sub kegiatan ini, dilakukan belanja makan minum rapat, ATK, kertas Cover, dan Perjalanan Dinas guna Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, untuk melaksanakan aktivitas berikut :

1. Rapat koordinasi membahas pembuatan aplikasi Manajemen Talenta Berbasis Teknologi dan Informasi (MATABATIN)
2. Rapat koordinasi membahas Aplikasi Survey Kepuasan Pelanggan PDAM
3. Rapat koordinasi membahas pembuatan aplikasi E CUTI
4. Rapat koordinasi membahas pembuatan aplikasi presensi Dinas Luar Anggota DPRD
5. Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Penataan Ruang (SI PETARUNG)
6. Rapat koordinasi membahas pembuatan Aplikasi / Sistem Informasi

- Layanan, Konsultasi dan Bimbingan Auditi (SILAKON BIMA)
7. Reviu tambahan fitur PKSP 360 pada aplikasi e-Kinerja / Penilaian Kinerja, Sikap, dan Perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) secara menyeluruh (360 derajat) yang melibatkan atasan, rekan kerja, dan bawahan
 8. Melaksanakan rapat pengembangan aplikasi Kepenak Ngodene
 9. Melaksanakan rapat pemenuhan data dukung SPBE tahun 2025
 10. Melaksanakan rapat reviu kebijakan internal tata kelola SPBE
 11. Menghadiri Harmonisasi Perencanaan Dinkominfo se-Jateng
 12. Menghadiri Refreshment Pengisian Indeks ETPD Semester I Tahun 2025
 13. Rakor Finalisasi Pengisian Championship TP2DD 2025
 14. Menghadiri undangan konsultasi penyusunan RTL atas LHE SAKIP di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI
 15. Kunjungan Studi Tiru Smart Village ke Kabupaten Temanggung



Alokasi anggaran Rp111.702.000,- realisasi Rp11.520.000,- (10.31%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai. Anggaran silpa Rp.100.000.000,- yang merupakan dana Pokir anggota DPRD Kabupaten Purbalingga yang tidak bisa diserap dikarenakan anggaran yang diperuntukkan untuk menyusun kajian SPBE tidak bisa dilaksanakan dengan adanya perubahan indicator tujuan dari Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintahan Digital sejak tahun 2025. Hal ini anggaran Pokir DPRD untuk kajian tersebut sudah tidak relevan sehingga tidak bisa dilaksanakan di Dinkominfo tahun anggaran 2025.

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

Program ini dimaksudkan guna mengetahui sejauh mana kondisi data OPD yang diupload pada satu data Purbalingga (mengacu pada data Pusat) dan mencetak Buku Purbalingga Dalam Angka (PDA) dan Kecamatan Dalam Angka (KDA) yang bersinergi

/bekerjasama dengan Kantor Statistik Kabupaten Purbalingga.

4.1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan :

a. Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektor Sesuai Standar

Aktifitasnya berupa makan minum rapat dan perjalanan dinas ke Provinsi dalam rangka pengembangan infrastruktur Geospasial Alokasi anggaran Rp15.289.000,- realisasi Rp15.189.000,- (99.35%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

b. Penyelenggaraan Statistik Sektor yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia

Aktifitasnya berupa Perjalanan Dinas Luar dan dalam kota/daerah, pembelian alat tulis kantor pendukung kegiatan statistik sektoral, dan pembelian alat-alat komputer. Alokasi anggaran Rp31.934.000,- realisasi Rp31.934.000,- (100%) realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Program ini dimaksudkan untuk mengetahui jumlah surat masuk dan keluar melalui santel dan keamanan persandian.

5.1. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi sandi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan :

a. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Aktifitasnya sosialisasi persandian, honor Tim Pelaksana kegiatan, pemeliharaan alat studi dan juga komunikasi dan pemancar alat telekomunikasi , pemeliharaan Radio RIG (Radio VHF), Belanja Alat Komunikasi (Faximile Type Thermal Paper). Sub kegiatan ini mengampu aktifitas seksi telekomunikasi yang memang tidak adanya alokasi anggaran. Alokasi anggaran Rp10.720.000,-, realisasi Rp10.713.000,- (99,93%) realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

5.2. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Aktifitasnya berupa Perjalanan Dinas Luar dan dalam kota/daerah, pembelian alat tulis kantor pendukung kegiatan keamanan informasi, dan pembelian alat tulis kantor, kertas cover, bahan computer, makan minum rapat kegiatan sosialisasi pemilik Internet Service Provider. Alokasi anggaran Rp10.402.000,- realisasi Rp10.295.000,- (98,97%) realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

b. Pelaksanaan Analisis kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Aktifitasnya berupa Perjalanan Dinas Luar dan dalam kota/daerah, pembelian alat tulis kantor pendukung kegiatan keamanan informasi, dan pembelian alat tulis kantor, kertas cover, bahan computer, makan minum rapat kegiatan sosialisasi, dan honorarium tenaga ahli dari BSSN. Alokasi anggaran Rp10.337.000,- realisasi Rp10.336.700,- (100%) realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

Dinkominfo Kabupaten Purbalingga dalam menjalankan tupoksinya hingga Tahun 2025 telah memenuhi bahkan melebihi target kinerja yang sudah ditetapkan.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2025 capaian kinerja Dinkominfo Kabupaten Purbalingga sesuai dengan target yang sudah diakomodir pada RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021-2026 dan 2025-2030. Dinkominfo Kabupaten Purbalingga mengampu enam indikator, dimana semuanya berstatus tercapai bahkan ada lima indikator yang melampaui target yang sudah ditentukan. Kelima indikator yang dimaksud diantaranya Indeks SPBE, Persentase ketersediaan data pada portal Satu Data Daerah, Tingkat keamanan Informasi Daerah, Nilai Kematangan Perangkat Daerah, Nilai Sakip Dinkominfo Kabupaten Purbalingga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Dinkominfo mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Informasi dan Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi;
2. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Informasi dan Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Informasi dan Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Informasi dan Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;

- 6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- 7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinkominfo Kabupaten Purbalingga menghadapi beberapa faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ketidaktercapaian antara lain adalah:

- 1. Kesiapan aplikasi dan data dukungnya dalam pengintegrasian, sehingga masih sedikitnya aplikasi pelayanan publik yang terintegrasi.
- 2. Keterbatasan jumlah infrastruktur dan peralatan, baik fasilitas publik, kecamatan, dan kelurahan yang belum terhubung. peralatan infrastruktur radio yang rusak dan tidak memenuhi standar.
- 3. Banyaknya akun media sosial dan layanan aduan masyarakat yang harus dikelola, sedangkan Sumber Daya manusia yang berkompeten sangat terbatas.

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya diantaranya:

- 1. Mengupayakan penyesuaian data-data pendukung aplikasi agar siap untuk diintegrasikan.
- 2. Memaksimalkan infrastruktur yang dimiliki oleh pihak ketiga.
- 3. Melakukan pemeliharaan terhadap peralatan yang rusak.
- 4. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang sudah ada dengan meningkatkan kualitas SDM.

Kinerja pelayanan Dinkominfo selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga

No	Indikator	SPM/ Stan dar Nasi onal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	Thn 2026	Thn 2023	Thn 2024 s.d. April	Thn 2024	Thn 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinkominfo		39	39	39	40	40	39	25	25	26	
2	Jumlah OPD yang saling terkoneksi di jaringan intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinkominfo		39	39	39	39	39	39	25	25	26	

No	Indikator	SPM/ Stan dar Nasi onal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	Thn 2026	Thn 2023	Thn 2024 s.d. April	Thn 2024	Thn 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		45	45	45	46	47	45	35	36	37	
4	Jumlah kegiatan (<i>event</i>) Perangkat Daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah		75	75	76	77	78	75	450	150	151	
5	Jumlah kegiatan (<i>event</i>) Perangkat Daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No. 5/2015		75	75	76	77	78	75	30	76	77	
6	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar		195	195	195	196	196	195	195	195	196	
7	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan		45	45	45	45	45	45	45	45	45	
8	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik		45	45	45	46	47	45	35	36	37	
9	Jumlah Layanan SPBE secara elektronik		45	45	45	46	47	45	35	36	37	
10	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik		16	16	16	16	16	16	16	16	16	
11	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan		268	268	269	270	271	268	268	269	270	
12	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
13	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah		42	42	43	44	45	40	44	43	44	
14	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung <i>smart city</i>		22	22	23	24	25	19	23	23	24	

No	Indikator	SPM/ Stan dar Nasi onal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	Thn 2026	Thn 2023	Thn 2024 s.d. April	Thn 2024	Thn 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinkominfo		17	17	17	18	19	17	17	17	18	
16	Jumlah komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah Daerah Provinsi yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah		14	14	14	14	14	14	14	14	14	
17	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah sesuai dengan strategi komunikasi		76	76	77	78	79	76	50	77	78	
18	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi SOP		875	875	876	877	878	500	876	876	877	
19	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik PPID		875	875	876	877	878	500	876	876	877	
20	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan akses Internet yang berkualitas yang disediakan Dinkominfo		39	39	40	41	42	40	41	40	41	
21	Jumlah Perangkat Daerah yang Memiliki Portal dan Situs Web yang Sesuai Standar Tahun 2023		39	39	40	41	42	40	41	40	41	
22	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Layanan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan		47	47	48	49	50	47	48	47	48	
23	Jumlah sistem elektronik website desa yang disediakan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga		127	127	127	127	127	127	127	127	127	
24	Jumlah Perangkat Daerah yang Menyimpan Data di Kabupaten		26	26	25	24	23	26	25	26	25	
25	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah		47	47	47	48	49	47	47	47	47	
26	Jumlah metadata indikator OPD/Instansi		33	33	34	35	36	33	34	33	34	
27	Jumlah sistem elektronik yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten purbalingga		27	27	28	29	30	27	28	27	28	
28	Program Kerja Layanan Keamanan informasi		7	7	7	7	7	7	7	7	7	
29	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral		67	67	68	69	70	67	45	68	69	
30	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral		67	67	68	69	70	67	45	68	69	
31	Indeks Keterbukaan Informasi Publik			97	94	94	94,5	92,95	96,19	96,19	94	
32	Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			16	19	19	20	16	19	16	19	

No	Indikator	SPM/ Stan dar Nasi onal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	Thn 2026	Thn 2023	Thn 2024 s.d. April	Thn 2024	Thn 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	Jumlah Sengketa Informasi Yang Selesai			9	16	19	20	16	9	10	11	
34	Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi			0	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	
35	Indeks SPBE	3,45		3,20	3,50	3,55	3,60	3,93	3,93	0	0	
36	Indeks Domain Kebijakan SPBE	2,91		4,00	4,01	4,015	4,02	3,2	0	0	0	
37	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2,27		3,80	3,810	3,815	3,820	2,8	0	0	0	
38	Indeks Domain Layanan SPBE	3,45		4,07	4,075	4,080	4,085	3,63	0	0	0	
39	Indeks Domain Manajemen SPBE	1,65		3,09	3,10	3,11	3,12	2,64	0	0	0	
40	Persentase Ketersediaan Data pada Portal Satu Data Purbalingga	100	100	100	100	100	100	100	30	100	100	
41	Persentase Pengamanan Informasi Daerah			43,2	43,21	43,22	43,23	43,2	62,42	58,90	59,20	
42	Persentase Jumlah Aplikasi yang Diassesment Keamanan Informasinya			15,70	15,80	15,81	15,82	15,79	5,00	15,80	15,81	
43	Persentase Jumlah Informasi yang Menggunakan Jaring Komunikasi Sandi			100	100	100	100	100	100	100	100	

Adapun hasil analisis kinerja pelayanan tiap-tiap kegiatan di Dinkominfo Kabupaten Purbalingga terbukti dengan jumlah layanan publik yang ada dan lokasinya dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.2.1 Lokasi Website & Aplikasi

List Website & Aplikasi Lain		
NO	LOKASI	Nama Aplikasi
	PDN	1. SIMANTAP 2. Purbalingga Memikat 3. E-Sakip 4. E-Kepegawaian 5. E-Kinerja 6. Geoportal 7. CBT BKPSDM 8. Dilan 9. Infowisata 10. MUI 11. Korpri 12. e-SPPD 13. Agendadinkopukm 14. PPID
	Lokal	1. Mail Purbalingga 2. Aduan CSIRT 3. CSIRT Purbalingga 4. BangsaMacapat 5. Simpel 6. Bakeuda Retribusi

Tabel 2.2.2

DAFTAR LAYANAN PUBLIK ONLINE DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

No	Aplikasi	OPD	Site
1	Syantika (Sistem Layanan Administrasi Kepegawaian)	DINKOMINFO	https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.purbalinggakab.santika
2	Satu Data Purbalingga (Portal Satu Data Pemkab Purbalingga)	DINKOMINFO	https://data.purbalinggakab.go.id/
3	DILAN-APP (Digital Layanan Pengajuan Aplikasi)	DINKOMINFO	https://dilan.purbalinggakab.go.id/
4	MATURBUP Versi Android (Media Aspirasi Tanya Jawab untuk Rakyat Bupati Purbalingga)	DINKOMINFO	https://apkpure.com/id/matur-bupati-purbalingga/id.go.purbalinggakab.maturbup.maturbup

5	MATURBUP PURBALINGGA (Media Aspirasi Tanya Jawab untuk Rakyat Bupati Purbalingga)	DINKOMINFO	https://maturbup.purbalinggakab.go.id/
6	SangJuara (Aplikasi Administrasi Kejuaraan Pemkab Purbalingga)	DINKOMINFO	ikps://sangjuara.purbalinggakab.go.id/
7	SIMPSPBE (Sistem Informasi SPBE Purbalingga)	DINKOMINFO	https://simpspe.purbalinggakab.go.id/
8	Portal Kecamatan (Portal website kecamatan)	DINKOMINFO	https://portalkecamatan.purbalinggakab.go.id/
9	Sijoli (Sistem informasi Jaringan Online)	DINKOMINFO	https://sijoli.purbalinggakab.go.id/
10	Monitoring Website (Monitoring Websile Milik Dinkominfo)	DINKOMINFO	https://monitoringwebsite.purbalinggakab.go.id/dashboard
11	Simita (Sistem manajemen Aset Jaringan)	DINKOMINFO	https://simita.purbalinggakab.go.id/auth
12	Pendaftaran Online RSUD Purbalingga (Aplikasi Android Pendaftaran Online RSUD Purbalingga)	RSUD GOETENG	https://apkpure.com/id/pendaftaran-online-rsud-purbalingga/rstudio.pendaftaronline
13	Aplikasi Android SiLapar Buku(Aplikasi Pesan Antar Buku)	DINARPUS	https://apkpure.com/id/silapar-buku-purbalingga/app.finasmart.kpadpurbalingga
14	Aplikasi Android E-Bangga (Aplikasi Elektronik Buku Purbalingga)	DINARPUS	https://apkpure.com/id/e-bangga-elektronik-buku-purbalingga/id.kubuku.kbk10905b0
15	Aplikasi TKA (Aplikasi Pengajuan Tenaga Kerja Asing)	DINAKER	https://tka-online.kemnaker.go.id/
16	Cegah Stunting (Website Aplikasi Cegah Stunting)	DALDUK	https://cegahstunting.purbalinggakab.go.id/
17	Dapodik (Data Pokok Kependidikan)	KEMDIKBUD	https://dapo.kemdikbud.go.id/
18	DigiT (sistem Perbendaharaan Anggaran Negara)	BAKEUDA	https://spanint.kemenkeu.go.id/spanintMaest/app/
19	E- Kepegawaian (Aplikasi data Kepegawaian Pemkab Purbalingga)	BKPPD	http://e-kepegawaian.purbalinggakab.go.id/
20	e-Kinerja (Sistem informasi Kinerja Pegawai)	BKPPD	https://e-kinerja.purbalinggakab.go.id/
21	E-Makaryo (Aplikasi bursa Kerja Jawa Tengah)	SNAKER PROV	https://bursakerja.jatengprov.go.id/
22	E-Monev Simbangda Kab. Purbalingga (Aplikasi e-monev Pembangunan)	SETDA PEMBANGUNAN	https://simbangda.purbalinggakab.go.id/
23	E-PRESENSI (aplikasi pengelolaan Presensi penghitung TPP)	BKPPD	https://e-presensi.purbalinggakab.go.id/
24	E-SPPT-SIMPBB (Sistem Informasi Pajak Bumi Bangunan)	BAKEUDA	http://epbb.purbalinggakab.go.id/Jogin

25	E-SPTPD (Aplikasi Penerimaan Pajak)	BAKEUDA	http://epbb.purbalinggakab.go.idJogin
26	INFO COVID-19 (Aplikasi Informasi covid-19 Purbalingga)	DINKES	https://corona.purbalinggakab.go.id/
27	Info Wisata Purbalingga (Aplikasi Info Wisata Purbalingga)	DINPORAPAR	http://infowisata.purbalinggakab.go.id/
28	Layanan Manajemen Keuangan (Aplikasi Keuangan Daerah0	BAKEUDA	https://simkeu-purbalingga.simdacloud.id/#!/client/CSIMKEU
29	Layanan Manajemen Penganggaran (Aplikasi Keuangan Daerah)	BAKEUDA	http://simdoud.id/purbalinggakab/
30	Layanan Manajemen Perencanaan (SIM Perencanaan Penganggaran Pelaporan)	BAPELITBANGDA	http://202.46.1.88/simral/
31	Monitoring PSC119 (Aplikasi Kegawatdaruratan Medik)	DINKES	https://admin.psc119purbalingga.comJog n
32	NERACA (Aplikasi Neraca Pangan Daerah)	DKPP	https://neraca.aksespangan.comJogin
33	Pelatian Kemnaker (Aplikasi pengajuan Pelatian Tenaga Keija)	DINAHER	https://pelatihan.kemnaker.go.id/
34	Pelayanan E-KTP Kab. Purbalingga (Website Pelayanan E-KTP Dukcapil)	DUKCAPIL	http://dinpendukcapil.purbalinggakab.go. d/
35	Sistem Perizinan Online (Aplikasi Perizinan Online Single	DPMPSTP	https://ss.go.id/

Selain capaian kinerja pelayanan, Dinkominfo juga memiliki beberapa inovasi. Inovasi yang telah dilakukan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga antara lain:

1. **Koresponden Liputan Produk UMKM Purbalingga** (KrupuG)
2. **GEO-PURBA** (Geospasial Purbalingga)
3. **ELASTIK** (E-Learning Sertifikat Elektronik
4. **e-Metadata** (ebook Metadata Indikator Statistik Sektoral)
5. **TATAKOMINFO** (Optimalisasi Publikasi Melalui Standarisasi Konten Digital Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga)
6. **E-Majalah Derap Perwira**
7. **Dinkominfo Menyapa**
8. **Ekovis** (Optimalisasi Publikasi Media Visual Menggunakan Ekosistem Digital di Dinkominfo Purbalingga)
9. **WADUK SEMFOR** (Wadah Edukasi Sadar Keamanan Informasi)
10. **PAMER INFO** (Podcast dan Media Center Dinkominfo)
11. **BAJU SEJASNI** (Berkah Jum'at, Sehat Jasmani Rohani)
12. **Website Bangga macapat**
13. **OMMEGA** (Optimalisasi Monitoring Media Massa Online Menggunakan Google Alerts)
14. **Sistem Informasi Digitalisasi Desa**
15. **JUBAH BARU** (Jumat Barokah Bahagia Berbagi Ilmu)
16. **Optimus Prime** (Optimalisasi Penerapan SSO Melalui Aplikasi Manajemen e-Akun

Berbasis Website)

17. **SIMPANDATA** (Sistem Penyimpanan Data Terpusat)

Analisis Kinerja Pelayanan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan pada fungsi Dinkominfo Kabupaten Purbalingga, hasil pengukuran dimaksud merupakan hasil penilaian sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Hasil perhitungan dalam pengukuran kinerja keuangan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga dengan akhir Tahun 2025 diperoleh rata-rata realisasi 89,32%, dengan nilai realisasi tertinggi sebesar 100%. Realisasi secara keseluruhan sudah diatas 80%. Beberapa sub kegiatan mencapai realisasi di bawah 80% diantaranya pada sub kegiatan berikut:

1. Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, hal ini dikarenakan anggaran Rp.100.000.000,- merupakan anggaran pokok anggota DPRD yang tidak bisa digunakan di Dinkominfo dikarenakan anggaran untuk kajian SPBE sudah tidak relevan karena Dinkominfo Kabupaten Purbalingga tidak lagi menggunakan Indeks SPBE sebagai indikator utama dan sudah beralih menjadi Indeks Pemerintahan Digital.
2. Pelayanan Informasi Publik, hal ini dikarenakan anggaran Rp.50.000.000,- merupakan anggaran pokok anggota DPRD yang tidak bisa digunakan di Dinkominfo dikarenakan anggaran untuk kajian Perda Keterbukaan Informasi Publik belum bisa dilaksanakan dikarenakan Perda tersebut masih dalam proses penyelesaian di Provinsi Jawa Tengah.

Adapun kegiatan-kegiatan lain di Dinkominfo juga penyerapannya baik yaitu rata-rata di atas 80%% sehingga anggaran bisa terserap dan digunakan secara optimal pada kegiatan yang dilaksanakan.

Sejak tahun 2025 Dinkominfo Kabupaten Purbalingga sudah tidak menggunakan indikator kinerja SPBE lagi, namun menggunakan Indeks Pemerintahan Digital (Indeks Pemdi) dan pelaksanaannya dimulai pada tahun 2026, namun Dinkominfo Kabupaten Purbalingga tidak termasuk Kabupaten yang menjadi lokus penilaian diantara 5 Kabupaten Kota di Jawa Tengah yang menjadi lokus penilaian Indeks Pemdi se-Provinsi Jawa Tengah.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor: 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga. Serta Perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga. Diperbaharui dengan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.

Berdasarkan peraturan di atas yang menjadi dasar bagi Dinkominfo Kabupaten Purbalingga untuk terus berupaya bekerja optimal sehingga dapat meraih target kinerja yang membanggakan. Hasil kinerja Dinkominfo Kabupaten Purbalingga yang membanggakan karena didukung kekuatan yang dimiliki di intern Dinkominfo Kabupaten Purbalingga diantaranya:

1. Pimpinan yang baik dan senantiasa memberi contoh serta motivasi kepada bawahan untuk bekerja keras, cerdas dan ikhlas.
2. Sumber daya manusia yang dimiliki Dinkominfo Kabupaten Purbalingga terhitung cukup memadai dari segi kualitas walaupun masih terbatasnya sarana pengembangan SDM yang ada, sedangkan dari segi kuantitas masih jauh dari cukup untuk menjalankan tupoksi yang ada.
3. Semangat yang tinggi untuk bekerja optimal baik dari pimpinan hingga seluruh staf Dinkominfo Kabupaten Purbalingga sehingga mampu meraih beberapa prestasi membanggakan baik di tingkat Provinsi bahkan tingkat Nasional.

Dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas Dinkominfo Kabupaten Purbalingga terdapat beberapa isu penting diantaranya :

1. PENDAMPINGAN BRIN.

Nota kesepakatan bersama BRIN terkait kegiatan peningkatan SDM (*transfer knowledge*) untuk urusan statistik dan persandian (keamanan siber) kesepakatan ini dimulai Tahun 2024- 2029.

Kesepakatan menggunakan *sharing cost*, BRIN menyediakan para mentor dan Dinkominfo terkait tata tempat, makan-minum, dan penyediaan internet saat pelatihan.

2. PENDAMPINGAN SMART CITY.

Program pendampingan penyusunan dokumen *master plan smart city* dari Kemenkominfo.

3. KERJASAMA DENGAN BALAI PENINGKATAN SDM YOGJAKARTA (wilayah BPSDMD wilayah DIY, Jateng, dan Bali)

- a. *Digital Entrepreneurship Academy* untuk 300 peserta dengan sasaran pelaku UMKM;
- b. *Thematic Academy* untuk pelaku wisata 120 peserta;
- c. *Vocational School Graduate Academy*, pelatihan digital untuk lulusan SLTA/ sederajat dengan peserta 70 orang

4. Nota kesepakatan dengan BIG.

Pelatihan Geospasial dan pembuatan *Road Map* dan SOP pelaksanaan Geospasial di Purbalingga.

(Nota kesepakatan menggunakan *sharing cost* dengan BIG, seperti yg dilakukan bersama BRIN.

5. Pemerintah Kabupaten dan Badan Publik sudah mencapai tahap Informatif dengan nilai dari Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah pada akhir tahun 2025⁴ sebesar 94,92. Optimalisasi fungsi pelayanan informasi publik sesuai tuntutan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik masih perlu terus ditingkatkan. Pada penguatan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/PPID masih perlu ditingkatkan guna peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

6. Arah Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Purbalingga Tahun 2025, sesuai surat edaran bupati purbalingga tentang pedoman penyusunan RKPD Tahun 2025 antara lain:

Peningkatan Pelayanan Publik, dengan fokus pada:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan berbasis kinerja melalui pengembangan regulasi dan sistem penunjang kinerja
- b. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, antara lain melalui:
 - 1) Meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan
 - 2) Membangun lingkungan budaya birokrasi yang bersih dan melayani
- c. Peningkatan Inovasi pelayanan publik, antara lain melalui:
 - 1) Digitalisasi Pelayanan Publik dalam Sistem Teknologi Informasi yang Terintegrasi.

- 2) Penguatan Desa, dengan:
 - a. Optimalisasi Potensi Desa melalui Pengembangan Desa Tematik,
 - b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui Penguatan Peran lembaga kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah;
 - c. Peningkatan tertib administrasi tatakelola pemerintahan desa melalui;
 - 1) digitalisasi desa
 - 2) pembinaan dan pengawasan administrasi desa
 - d. Peningkatan sarana dan prasarana desa
7. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik/SPBE sudah mencapai nilai indeks sangat baik, namun tingkat kematangan pelaksanaan audit infrastruktur SPBE merupakan indikator terendah. Hal ini menggambarkan kinerja yang masih perlu dipacu untuk lebih meningkatkan perannya dalam manajemen SPBE terutama dalam audit infrastrukturnya. Di sisi lain kinerja optimal Dinkominfo Kabupaten Purbalingga sangat signifikan dalam pelayanan publik.
8. Gambaran pelaksanaan SPBE di internal Kabupaten Purbalingga menjadi efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran maupun kinerja. Namun disisi lain, Kabupaten Purbalingga masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada aspek manajemen pengetahuan dan kompetensi SDM. Pada Aspek manajemen pengetahuan dan kompetensi SDM, dapat dimulai dengan melakukan kegiatan yang terencana serta membentuk tim yang mendokumentasikan seluruh pengetahuan dan perubahan yang dilakukan di lingkup penerapan SPBE di Kabupaten Purbalingga. Diharapkan juga dapat melakukan inisiatif penerapan Manajemen SPBE sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian sesuai target. Proses unggah bukti dukung perlu dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan indikator yang diminta agar tidak terlalu banyak bukti dukung dan kurang relevan dengan indikator yang ditanyakan. Hal ini dikarenakan Indeks SPBE masih mendukung Indeks Pemdi walaupun sudah bukan menjadi indikator utama penilaian kinerja Dinkominfo.
9. Indek Keamanan Informasi masih rendah/kurangnya dukungan infrastruktur keamanan informasi baik *hardware* maupun *soft ware*;

10. Pengelolaan data statistik sektoral yang belum maksimal dikarenakan OPD tidak menyajikan data secara update dan juga belum adanya revisi Peraturan Bupati tentang Satu Data Purbalingga yang berisi satuan data.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Berdasarkan gambaran tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga ditemui beberapa permasalahan dan hambatan dalam menjalankannya. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Perlunya peningkatan optimalisasi penerapan kebijakan internal, tata kelola dan layanan SPBE;
2. Perlunya peningkatan efektivitas penerapan strategi dan pemanfaatan media komunikasi publik;
3. Perlunya peningkatan sarpras infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang memadai;
4. Perlunya peningkatan pemanfaatan aplikasi informatika dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah;
5. Perlunya peningkatan optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral;
6. Perlunya peningkatan optimalisasi peran/keterbukaan badan publik dalam penyediaan informasi;
7. Perlunya peningkatan upaya mewujudkan *single data* dan penguatan pengelolaan data statistik sektoral;
8. Perlunya peningkatan keamanan informasi sesuai sertifikasi standar yang ditentukan;
9. Perlunya peralatan pendukung utama dan wajib persandian sesuai rekomendasi standar keamanan informasi;
10. Sarana dan Prasarana pendukung sesuai spesifikasi yang dibutuhkan masih kurang memadai;

2.3.3 Dampaknya Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, dan Terhadap Capaian Nasional/Internasional

Perumusan indikator pembangunan yang menjadi tanggung jawab Dinkominfo Kabupaten Purbalingga pada dokumen RPJMD belum dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap capaian. Hal tersebut diantaranya disebabkan belum adanya fokus, sinkronisasi dan koordinasi yang maksimal antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta kabupaten/kota serta belum maksimal menjadi prioritas pembangunan.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan

Dinkominfo Kabupaten Purbalingga dalam mendukung kinerja program pembangunan dalam pencapaian visi dan misi pembangunan antara lain:

1. Kapasitas, kualitas, kuantitas SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi belum optimal;
2. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
3. Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai.

2.3.4 Tantangan dan Peluang

Dalam Upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinkominfo, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada guna mempertajam kebijakan pelayanan Dinkominfo untuk mendukung pencapaian target dan sasaran Dinominfo Kabupaten Purbalingga.

1. Tantangan:

- a. Kesenjangan informasi di masyarakat Kabupaten Purbalingga;
- b. Pesatnya perkembangan TIK;
- c. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum memadai;
- d. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat Kabupaten Purbalingga terhadap TIK;
- e. Data statistik sektoral yang terintegrasi melalui *Single Data System*;
- f. Tuntutan keterbukaan data dan informasi;
- g. Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui pemanfaatan persandian dan peningkatan kualitas keamanan informasi.

Secara umum pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik meskipun terdapat kendala yang berpengaruh terhadap beberapa hal di kegiatan bidang IKP antara lain:

- a) Kurangnya peralatan ‘tempur’ yang memadai terutama peralatan liputan-liputan;
- b) Keterbatasan pelaksanaan rapat dan koordinasi baik intern kabupaten maupun koordinasi ke Provinsi dan ke Pemerintah Pusat (makan/minum, narasumber, dan sppd);
- c) Keterbatasan anggaran lembur dan uang saku perjalanan dalam daerah (banyaknya kegiatan peliputan di wilayah, baik hari kerja maupun hari libur).

Selain capaian-capaian di atas ditemui kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang Informatika, diantaranya:

1. Pembuatan aplikasi dilakukan secara individu dikarenakan banyaknya permintaan dari OPD sedangkan tenaga teknis di Informatika masih terbatas;
2. Diharapkan kepada semua staf paham aplikasi dan dapat menjelaskan jika ada yang OPD/masyarakat yang berkonsultasi;
3. Email bermasalah (terdeteksi spam) sedang diselesaikan menggunakan zimbra mail server;

Kendala di bidang Infrastruktur teknologi informasi komunikasi, statistik dan persandian/ITSP diantaranya:

1. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana pengolah data yang mengakibatkan lambatnya Distribusi serta Kinerja Pengamanan Informasi
2. Perawatan Jaringan Telepon PABX di Lingkungan Setda masih menjadi tanggung jawab Dinkominfo sehingga mengurangi alokasi anggaran kegiatan persandian
3. Masih kurangnya kesadaran terkait keamanan informasi,
4. Sarpras penunjang kegiatan pengamanan informasi belum memadai,
5. Kurangnya kompetensi pengelola keamanan informasi,
6. Belum Operasionalnya (Launching) Computer Security Incident Response Team (CSIRT),
7. Belum optimalnya Indeks KAMI (Keamanan Informasi), Evaluasi Persandian dan Tingkat Maturitas Penanganan Insiden (TMPI)
8. Banyaknya akuisisi atau pemindahan kepemilikan menara antar provider sebenarnya termasuk untuk kendala target Realisasi PAD tahun 2022 yg tidak tercapai 100%
9. Belum adanya penataan kabel optik dan tiangnya sehingga jika dibiarkan terus menerus akan mengganggu estetika kota.
10. Belum ada pelaporan ke dinas yang menangani telekomunikasi dalam hal ini Dinkominfo sehingga kesulitan dalam pendataan, sejauh ini belum ada data banyaknya provider ISP yang ada di purbalingga, Luas area cakupan dan berapa KM kabel yang digelar serta berapa buah yang terpasang.
11. Dalam pemasangan kabel atau tiang kadangkala meninggalkan kaidah standar SNI, contoh, terkait kedalaman tiang yang aman sehingga tidak roboh, kemudian batas maksimal dalam satu titik bisa dipasang tiang.
12. Masih adanya para penyelenggara ISP yang belum berijin khususnya bagi yang menjual kembali jasa telekomunikasinya.
15. Kurangnya Dukungan Finansial, Kurangnya ketersediaan anggaran untuk

kegiatan statistik menyebabkan beberapa kegiatan belum terlaksana, seperti Cetak Buku Statistik Metadata Variabel dan Indikator, Desk Satu Data yang seharusnya dilaksanakan oleh walidata tetapi realitanya masih dilaksanakan oleh Bappelitbangda, serta data yg diperoleh belum sampai level kecamatan dan instansi vertikal

16. Updating Data, belum melakukan updating data secara periodik sesuai dengan waktu rilis data
17. Kualitas Pengelolaan Data, Perlunya peningkatan kemampuan/ keterampilan Pengelolaan Data Statistik
18. Belum Memadainya Sarana dan Prasarana Perangkat yang digunakan untuk menghimpun, mengolah dan mendiseminasikan Data, hal ini menyebabkan hasil kinerja kurang maksimal.

Khusus di kegiatan Keamanan Informasi terdapat kendala antara lain:

1. SDM Persandian kurang memiliki kompetensi keamanan siber yang memadai
2. Belum masifnya implementasi kebijakan tata kelola persandian dan keamanan informasi
3. Belum adanya *blue print* tata kelola persandian dan keamanan informasi jangka panjang
4. Berita berklasifikasi belum terdokumentasi dengan baik
5. Belum diterapkannya Sertifikat Elektronik di lingkungan Desa/Kelurahan
6. Belum efektifnya Purbalinggakab-CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*)
7. Belum diterapkan ISO 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi
8. Belum adanya data center yang memadai
9. Rendahnya Information Security Awareness di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
10. Belum optimalnya pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian
11. Rendahnya indeks KAMI di lingkungan pemerintah Kabupaten Purbalingga
12. Belum optimalnya Tingkat Maturitas Penanganan Insiden (TMPI) di lingkungan pemerintah Kabupaten Purbalingga

2. Peluang:

- a. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik Kabupaten Purbalingga berbasis teknologi informasi;
- b. Kebutuhan pengembangan muatan *e-Government* sesuai karakteristik daerah di Kabupaten Purbalingga;
- c. Kesadaran masyarakat Kabupaten Purbalingga akan pentingnya data,

informasi dan komunikasi;

- d. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Purbalingga berbasis elektronik
- e. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai peningkatan efisiensi dan efektifitas pembangunan daerah.

2.3.5 Rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Rekomendasi dan tindak lanjut bidang IKP pada kegiatan PPID yaitu:

- a) Review website PPID
- b) Persiapan materi 2025 (Perda, DIP, DIK)
- c) Sosialisasi/Bimbingan Teknis bagi OPD

Rekomendasi dan tindak lanjut bidang IKP pada kegiatan Pemeliharaan dan Pindah Lokasi Rangka Baliho yaitu:

- a) Pemindahan rangka di Karangreja
- b) Pemasangan (pindah lokasi) rangka bekas dari Taman Usman Janatin
- c) Pemeliharaan rangka di pintu masuk Pendopo Dipokusumo

Rekomendasi dan tindak lanjut lainnya bidang IKP yaitu:

- a) Pembuatan Baliho/Banner, menyesuaikan tema kegiatan dan rangka yang tersedia
- b) Pembuatan kalender rutin tahunan yang akan dibagi pada saat Hari Jadi dan Expo
- c) Mengganti nama medsos dinkominfo bkg dan membuat akun baru untuk dinas sebagai pemenuhan kelengkapan dokumen penilaian PPID.

Rencana tindak lanjut dan rekomendasi bidang Informatika antara lain sebagai berikut:

1. Kesanggupan admin OPD untuk pengelolaan aplikasi
2. Digitalisasi layanan publik
3. Medsos Dinkominfo sbg PPID Pelaksana dengan admin masing-masing Bidang
4. Pengembangan Website PPID
5. Melanjutkan kegiatan “Jubah Baru” setiap hari Jum'at barokah berbagi ilmu di aula Dinkominfo dalam melayani pengaduan masyarakat.
6. Kelanjutan pelaksanaan dari Bimbingan Teknis *Smart City* yang dilaksanakan pada tahun 2024.

Adapun rekomendasi rencana tindak lanjut bidang ITSP yaitu:

1. Sosialisasi kebijakan tata kelola persandian dan keamanan informasi.
2. Penyusunan blue print/rencana tata kelola persandian dan keamanan informasi yang *SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound)*

3. Manajemen berita berklasifikasi dari email sanapati
4. Koordinasi dengan Desa/Kelurahan sertaDinarpus dalam implementasi TTE pada aplikasi Srikandi
5. Kesiapan infrastruktur dan SDM yangmemenuhi pelaksanaan CSIRT
6. Sosialisasi kebijakan terkait SMKI dan inisiasi penerapan ISO 27001:2022 melalui pihak ke 3 pengelola data center
7. Penyusunan KAK dan pengadaan data center dan co-location
8. Bekerjama dengan Kementrian Komintomelalui Program Digitalent.
9. Koordinasi dengan Diskominfo Provinsi dan BSSN terkait evaluasi pelaksanaan persandian.
10. Koordinasi Bersama Stakeholder untuk merumuskan tujuan dari Persandian daerah
11. Pengajuan asistensi Indeks KAMI denganBSSN
12. Pengajuan sistensi TMPI dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Purbalinggakab-CSIRT.
13. Launching Purbalinggakab-CSIRT
14. Verifikasi Indeks KAMI (Keamanan Informasi)
15. Inisiasi Audit Internal TIK SPBE (Infrastruktur, Aplikasi, Keamanan)
16. Sharing Knowledge dengan BRIN
17. Optimalisasi Jaring Komunikasi Sandi (Sanapati dan Srikandi)
18. Optimalisasi Penanganan Insiden Siber melalui Web:
<https://csirt.purbalinggakab.go.id/>
19. Sosialisasi *Cyber Security Awareness* kepada pelajar di Purbalingga
20. Implementasi Sertifikat Elektronik di Lingkup Desa
21. Peningkatan SDM Kamsider Purbalingga (Pelatihan JPT, SOC, CSIRT)
22. Melakukan Permohonan Permintaan Titik Koordinat Ke Tiap Tiap Pemilik BTS Menara Telekomunikasi
23. Melakukan Permohonan Permintaan Nomor IMB pada setiap Bangunan Menara Yang Telah Berdiri dan Masih Beroperasi
24. Kualitas Data, Beberapa data yang dikumpulkan masih belum memenuhi atribut kelengkapan metadata.
25. Belum Optimalnya Pemanfaatan Geoportal, Belum adanya web GIS yang dibangun berdasarkan pengembangan dari Geoportal
26. Portal Satu Data Daerah yang Bervariasi, Beberapa Kab/Kota hanya menggunakan CKAN sebagai Portal Satu Data, ada Juga yang melakukan Pemutakhiran dengan membangun Aplikasi Baru. Tentunya seharusnya ada kiat dari pemprov/pusat untuk menstandarkan Portal Satu Data, seperti standarisasi Geoportal

27. Survei Kebutuhan Data, Pengisian Rekomendasi Statistik, Proses Validasi dan Penerbitan Rekomendasi, Validasi Data Geospasial, Proses Pemutakhiran Portal Satu Data Purbalingga

Rekomendasi dan tindak lanjut urusan LPPL RGS antara lain:

- a. Perlu adanya perbaikan tiang pancang dan peremajaan tower yang memadai atau pengecatan tower, dikarenakan kondisi saat ini tower sudah melintir dan belum pernah ada pengecatan ulang dari awal pembangunan.
- b. Perlu adanya pengadaan sparepart pemancar/booter berupa power supply untuk booster karena pada Tanggal 30 Januari 2019 Pukul 01:30 WIB terjadi kerusakan pada *Power Supply Booster* Pemancar dan sampai sekarang belum adanya pengadaan sparepart tersebut untuk mengganti dan untuk cadangan jika sewaktu-waktu terjadi kerusakan kembali, dengan spesifikasi tegangan 48V/50V 50A.
- c. Perlu adanya pengadaan sparepart pemancar/booster berupa pallet fm blf188xr/mrf1k25 untuk mengganti pallet booster jika sewaktu-waktu mati karena ada masa pakainya.
- d. Perlu adanya pengadaan UPS untuk membackup computer agar tidak langsung mati ketika listrik padam agar computer terutama hardisk tidak mudah rusak.
- e. Perlu adanya pengadaan alat audio management.

Secara umum pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik meskipun terdapat kendala-kendala disamping adanya beberapa keterbatasan yang berpengaruh terhadap beberapa hal di atas.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Penyusunan dokumen perencanaan berupa Renja OPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan pada tingkat OPD sudah melalui proses dengan keterlibatan masyarakat secara luas, yaitu dengan melakukan inventarisasi, klarifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui proses musrenbang.

Dari hasil pencermatan internal ada perbedaan antara jumlah anggaran yang diusulkan dengan jumlah anggaran pada rancangan RKPD. Adapun hasil dari proses yang dilakukan dalam rangka membandingkan rancangan awal dengan analisis kebutuhan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rewiew Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Progam/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	11	(12)
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Purbalingga	Presentase OPD yang memiliki website aktif	100%	868,497,000	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Purbalingga	Presentase OPD yang memiliki website aktif	100%	875.277.000	
2	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	868,497,000	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	875.277.000	
3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Purbalingga	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	12 Media	467,244,000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Purbalingga	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	12 Media	471.528.000	Pergeseran dari Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
4	Pelayanan Informasi Publik	Purbalingga	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	19 Permohonan	366,985,000	Pelayanan Informasi Publik	Purbalingga	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	13 Permohonan	366,985,000	
5	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Purbalingga	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	11 Orang	12,155,000	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Purbalingga	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	5 Orang	20.000.000	
6	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Purbalingga	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media, dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	14 Kim	22,113,000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Purbalingga	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media, dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	14 Kim	25.764.000	

7	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Purbalingga	Persentase Pelayanan Publik yang menggunakan aplikasi informatika	100%	1.167.225.000	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Purbalingga	Persentase Pelayanan Publik yang menggunakan aplikasi informatika	100%	1.176.986.000	
8	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Indeks SPBE	3.93 Indeks	1,148,125,000	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Indeks SPBE	3,93 Indeks	1.156,986.000	
9	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Purbalingga	Jumlah Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintahan Daerah	12 Aplikasi	111,702,000	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Purbalingga	Jumlah Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintahan Daerah	12 Aplikasi	121.508.000	
10	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Purbalingga	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	30 Perangkat	1,036,423,000	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Purbalingga	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	30 Perangkat	1,156,986,000	
11	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Penegelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Purbalingga	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Penegelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	19,100,000	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah website dan sub domain OPD yang terpelihara dan yang update	1 Dokumen	1.0255.478.000	
12	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	19,100,000	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	20.000.000	
13	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Purbalingga	Presentase OPD yang menyediakan dan mengupdate data sektoral sesuai standar	100%	47,223,000	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Purbalingga	Presentase OPD yang menyediakan dan mengupdate data sektoral sesuai standar	100%	76.068.000	
14	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase OPD yang menyediakan dan mengupdate data Sektoral sesuai standar	100%	47,223,000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase OPD yang menyediakan dan mengupdate data Sektoral sesuai standar	100%	76.068.000	

1.156.986.000

15	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Purbalingga	Jumlah kegiatan Statistik Sektoral yang telah dilengkapi Metadata	27 Dokumen	31.934.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Purbalingga	Jumlah kegiatan Statistik Sektoral yang telah dilengkapi Metadata	27 Dokumen	52.949.000	
16	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral sesuai Standar	Purbalingga	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	27 Dokumen	15.289.000	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral sesuai Standar	Purbalingga	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	27 Dokumen	23.119.000	
17	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Indeks KAMI	376 Indeks	54,061,000	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Purbalingga	Persentase Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	376 Indeks	54,061,000	
22	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase operasional jaring komunikasi Pemerintah Daerah	100%	20.739.000	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase operasional jaring komunikasi Pemerintah Daerah	100%	33.208.000	
23	Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10,402,000	Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	16.604.000	
24	Penatalaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	10,337,000	Penatalaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	16.604.000	
25	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Presentase operasional jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah	100%	10,720,000	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Presentase operasional jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah	100%	15.940.000	
26	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	1 PD	17,533,000	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	1 PD	15.940.000	

27	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingga	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, dengan indikator kinerja: Persentase dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan. Sasaran 2: Terselesaikannya tindak lanjut temuan pengelolaan anggaran sesuai ketentuan, dengan indikator kinerja: Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti Sasaran 3: Meningkatnya kualitas penatausahaan barang milik daerah, dengan indikator kinerja: Persentase penatausahaan, pemeliharaan, dan pengadaan barang milik daerah sesuai ketentuan Sasaran 4: Terpenuhinya layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang, dengan indikator kinerja: Persentase pemenuhan layanan kepegawaian, administrasi umum, dan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	5.987.822.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingga	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, dengan indikator kinerja: Persentase dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan. Sasaran 2: Terselesaikannya tindak lanjut temuan pengelolaan anggaran sesuai ketentuan, dengan indikator kinerja: Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti Sasaran 3: Meningkatnya kualitas penatausahaan barang milik daerah, dengan indikator kinerja: Persentase penatausahaan, pemeliharaan, dan pengadaan barang milik daerah sesuai ketentuan Sasaran 4: Terpenuhinya layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang, dengan indikator kinerja: Persentase pemenuhan layanan kepegawaian, administrasi umum, dan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	6.368.287.000	
28	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100%	2,599,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100%	3.652.000	
29	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purbalingga	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	21 Dokumen	2,599,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purbalingga	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	21 Dokumen	3.652.000	
30	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purbalingga	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	1,244,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purbalingga	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	1.660.000	

31	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun Sesuai Ketentun	100%	5,209,294,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun Sesuai Ketentun	100%	5.495.748.000	
32	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Purbalingga	Jumlah Orang yang meneri gaji dan tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	5,146,720,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Purbalingga	Jumlah Orang yang meneri gaji dan tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	5.404.697.000	
33	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Purbalingga	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	70 Dokumen	28,452,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Purbalingga	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	70 Dokumen	56.906.000	
34	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Purbalingga	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	2 Dokumen	34,122,000	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Purbalingga	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	2 Dokumen	34.145.000	
35	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian	100%	257,818,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian	100%	93.380.000	
36	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Purbalingga	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	5 Orang	-	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Purbalingga	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	5 Orang	5.000.000	
37	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Purbalingga	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	90,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Purbalingga	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	90,000.000	
38	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase Pemenuhan Adminstrasi Umum Penunjang Operasional Kantor	100%	44,918,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase Pemenuhan Adminstrasi Umum Penunjang Operasional Kantor	100%	30.835.000	
39	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Purbalingga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2,000,000	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Purbalingga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.000.000	
40	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Purbalingga	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	10,654,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Purbalingga	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	15.000.000	
41	Fasilitasi kunjungan tamu	Purbalingga	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	6 ,380,000	Fasilitasi kunjungan tamu	Purbalingga	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	8.000.000	

42	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Purbalingga	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	2,680,000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Purbalingga	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	3.843.000	
43	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Purbalingga	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	6 Dokumen	1,885,000	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Purbalingga	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	6 Dokumen	1.992.000	
44	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Daerah	Purbalingga	Persentase Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Tersusun	100%	2,191,000	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Daerah	Purbalingga	Persentase Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Tersusun	100%	1.992.000	
45	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Purbalingga	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	12 Laporan	1,970,000	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Purbalingga	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	12 Laporan	1.992.000	
46	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingga	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	590,014,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingga	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	554.377.000	
47	Penyediaan jasa surat menyurat	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	323,000	Penyediaan jasa surat menyurat	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	323,000	
48	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	55,374,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	55.374.000	
49	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	1,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	1.000.000	
50	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	416,980,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	497.680.000	
51	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingga	Presentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	55,000,000,000-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingga	Presentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	55.000.000	

52	Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purbalingga	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 Unit	55,000,000,000	Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purbalingga	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 Unit	55.000.000	
53	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingga	Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	100%	110,539,440	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingga	Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	100%	95.491.000	
54	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Purbalingga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	126,192,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Purbalingga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	126.192.000	
55	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purbalingga	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Unit	3,491,440	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purbalingga	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Unit	3.491.000	
56	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Purbalingga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas	1 Unit	2,000,000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Purbalingga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas	1 Unit	2.000.000	

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat perubahan pada Rancangan awal RKPD Tahun 2025 dan pada hasil analisis kebutuhan diantaranya:

- A. Anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mengalami penurunan sebesar Rp106.861.000,- atau sekitar 1,94% dikarenakan penetapan pagu anggaran 2025 di SIPD dari Bappelitbangda masih mengacu kepada pagu anggaran murni 2024, belum mengikuti pagu Gaji dan Tunjangan ASN pada anggaran perubahan 2024 yang sudah sesuai dengan kebutuhan ASN Dinkominfo. Dimana pagu anggaran perubahan 2024 sudah mencakup kekurangan gaji karena adanya kenaikan gaji sebesar 8% dan adanya rapel gaji CPNS menjadi PNS di Tahun 2024.
- B. Anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN mengalami penurunan sebesar Rp20.000.000,- atau sekitar 26,01%, hal ini karena belum mencakup kegiatan yang belum diselenggarakan di tahun sebelumnya dan belum dianggarkan di tahun 2025, diantaranya:
 - 1. Evaluasi *Smart City* yang merupakan kelanjutan dari Fasilitasi Program Pendampingan *Smart City* dari Kementerian Kominfo.
 - 2. Kerjasama Fasilitasi Program *Digital Talent Scholarship* dari BPSDMD Kominfo Yogyakarta.
 - 3. Pendampingan dengan BRIN dalam kegiatan Statistik dan Persandian.Kegiatan **Statistik** dalam hal: Peningkatan Kapasitas dan Optimalisasi Pemanfaatan Satu Data Daerah melalui pendekatan *Data Science* dalam rangka mewujudkan *Smart City* Kabupaten Purbalingga, sedangkan kegiatan **Persandian** dalam hal: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Indeks KAMI (Keamanan Informasi) di Kabupaten Purbalingga.
- 4. Penganugrahan “Bhumandala Award”.
- 5. Rakornas Kemenkominfo.
- 6. Uji Publik Pelaksanaan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kabupaten Purbalingga.
- 7. Penganugerahan Badan Publik.
- C. Anggaran pada sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi mengalami penurunan sebesar Rp18.950.000,- atau sekitar 35,69% dikarenakan honor pengelola keuangan 6 bulan, baru tercukupi 4 bulan.
- D. Anggaran DBHCHT pada sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan mengalami penurunan sebesar Rp138.380.000,- atau sekitar 59,29% dikarenakan

pergeseran anggaran ke sub kegiatan Pengelolaan Media komunikasi Publik sebesar Rp.140.000.000,- dan karena adanya penambahan anggaran sebesar Rp.1.620.000,-

- E. Anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor mengalami penurunan sebesar Rp10.000.000,- atau sekitar 40,00% adanya pergeseran anggaran ke sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya guna pengadaan *scanner*.
- F. Anggaran pada sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD mengalami penurunan sebesar Rp1.800.000,- atau sekitar 47,47% dikarenakan honor operator SIPD dan SIMDA yang seharusnya 6 bulan, baru tercukupi 3 bulan.
- G. Anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor terlihat adanya penambahan anggaran sebesar Rp77.763.000,- atau sekitar 15,63% dikarenakan pagu anggaran 2025 masih berdasarkan pagu anggaran murni 2024 sebelum adanya pergeseran anggaran ini ke sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya serta Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dikarenakan keterbatasan laptop, printer dan *scanner* layak pakai yang tersedia guna operasional di Sekretariat Dinkominfo.
- H. Anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan mengalami penurunan sebesar Rp43.074.000,- atau sekitar 25,45% dikarenakan pagu anggaran masih berdasarkan pagu murni 2024, dimana kebutuhan dan pemeliharaan kendaraan untuk operasional kantor belum mencukupi kebutuhan operasional penuh selama 12 bulan.
- I. Anggaran pada sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp10.200.000,- atau sekitar 74,50% dikarenakan pagu anggaran masih berdasarkan pagu murni 2024, sebelum adanya pergeseran anggaran dari sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- J. Anggaran pada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bngunan Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp53.063.000,- atau sekitar 96,37% dikarenakan pagu anggaran masih berdasarkan pagu murni 2024, sebelum adanya pergeseran anggaran dari sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- K. Anggaran pada sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik mengalami penurunan sebesar Rp47.596.000,- atau sekitar 9,17% dikarenakan pagu anggaran masih

berdasarkan pagu murni 2024, sebelum adanya penambahan anggaran di perubahan 2024 sebesar Rp187.596.000,- dan karena pergeseran anggaran dari sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp140.000.000,- masih lebih rendah dibanding pagu anggaran perubahan 2024.

- L. Anggaran pada sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik mengalami penurunan sebesar Rp4.137.000,- atau sekitar 1,17% dikarenakan pagu anggaran masih berdasarkan pagu murni 2024 dan karena adanya tambahan anggaran sebesar Rp.50.000.000,- untuk NA Raperda Keterbukaan Informasi Publik.
- M. Anggaran pada sub kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik mengalami penurunan sebesar Rp11.136.000,- atau sekitar 35,77% dikarenakan pagu anggaran masih berdasarkan pagu murni 2024, sebelum adanya penambahan anggaran di perubahan 2024 guna perjalanan dinas terkait penilaian keterbukaan informasi publik dan kehumasan yang diadakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan Diskominfo Provinsi termasuk uji publik keterbukaan informasi.
- N. Anggaran pada sub kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berganti nama menjadi sub kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa.
- O. Anggaran pada sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah berganti nama menjadi sub kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- P. Anggaran pada sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta mengalami penurunan sebesar Rp100.000.000,- dikarenakan adanya pengurangan anggaran perubahan 2024 sebesar Rp200.000.000,- pada pengadaan 1 unit server dan adanya penambahan anggaran sebesar Rp.100.000.000,- untuk Kajian penyusunan arsitektur SPBE.
- Q. Anggaran pada sub kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektorial Sesuai Standar mengalami penurunan sebesar Rp10.000.000,- dikarenakan pagu anggaran masih berdasarkan pagu murni 2024.
- R. Anggaran pada sub kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektorial dan sub kegiatan Pengembangan Infrastruktur berganti nama menjadi sub kegiatan Pelaksanaan Proses

Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar. Sedangkan sub kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah berganti nama menjadi sub kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia. Dimana pada sub kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia mengalami penambahan anggaran sebesar Rp.36.500.000,- Cetak buku PDA, KDA, Bintek Geospasial.

Anggaran pada sub kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalami penurunan sebesar Rp2.400.000,- atau sekitar 12,63% dikarenakan pagu anggaran masih berdasarkan pagu murni 2024, sebelum adanya penambahan anggaran di perubahan 2024.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Proses perencanaan atau planning adalah bagian dari daur kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan (*decision making*) untuk masa depan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Salah satu proses atau perencanaan yang sering dilakukan dalam melakukan pembangunan adalah dengan menggunakan sistem pembangunan yang bersifat *Bottom-Up*. *Bottom-Up Planning* adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dimana atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Dalam hal ini atasan merupakan pemerintah dan bawahan merupakan masyarakat, swasta serta pemangku kepentingan.

Program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam satu rumpun Infrastruktur Pembangunan Wilayah/IPW disampaikan dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah/Forum OPD sebelum dilaksanakannya Musrenbang Kabupaten. Pembahasan program dan kegiatan antar OPD bersama masyarakat ini dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah. Usulan program dan kegiatan masyarakat disampaikan oleh masyarakat di Forum OPD yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD yang berkompeten di bidangnya. Hal ini juga sebagai salah satu bentuk keselarasan usulan masyarakat dalam pelaksanaan oleh OPD terkait serta sebagai langkah optimalisasi pencapaian sasaran sesuai kewenangan dan sinergitas antar OPD dalam pelaksanaannya, khususnya di rumpun IPW.

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga saat ini belum ada jaring aspirasi DPRD Kabupaten Purbalingga terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Namun dalam hal ini terdapat sepuluh usulan aspirasi masyarakat yang ditujukan kepada Dinkominfo Kabupaten Purbalingga sebagai hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan. Dinkominfo Kabupaten Purbalingga bersedia sebagai narasumber dalam kegiatan yang menjadi usulan/aspirasi masyarakat dari

desa/kelurahan terkait tupoksi Dinkominfo dengan anggaran kegiatan dari desa/kelurahan yang mengusulkan aspirasi kegiatan tersebut. Usulan hasil musrenbang ada setelah dilaksanakan musrenbang Desa/Kelurahan, musrenbang kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) adalah mendukung transformasi digital nasional dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Sasaran strategisnya meliputi peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital, peningkatan literasi digital masyarakat, pengembangan infrastruktur digital yang merata, serta pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang efektif.

3.1.1. Tujuan:

- **Mendukung transformasi digital nasional:**
Kominfo berupaya mendorong perkembangan teknologi digital di berbagai sektor untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing bangsa.
- **Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan:**
Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, Kominfo bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan transparan.
- **Mewujudkan Indonesia Informatif:**
Kominfo berupaya memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat, mudah diakses, dan bermanfaat, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- **Membangun SDM Unggul:**
Kominfo juga berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika untuk mendukung transformasi digital.

3.1.2. Sasaran Strategis:

- **Peningkatan Kualitas Layanan Publik Berbasis Digital:**
Kominfo fokus pada pengembangan aplikasi dan sistem informasi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik, seperti perizinan, informasi kependudukan, dan lainnya.
- **Peningkatan Literasi Digital Masyarakat:**
Program-program literasi digital bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara bijak dan bertanggung jawab.
- **Pengembangan Infrastruktur Digital yang Merata:**
Kominfo berupaya memperluas jangkauan dan kualitas infrastruktur digital,

termasuk jaringan internet, ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil dan tertinggal.

- **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang Efektif:**
Kominfo berupaya memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat, relevan, dan tepat waktu, serta mengelola komunikasi publik secara efektif.
- **Perlindungan Data Pribadi:**
Kominfo berperan dalam penyusunan regulasi dan implementasi sistem perlindungan data pribadi untuk menjaga privasi masyarakat dalam era digital.
- **Pengawasan Ruang Digital:**
Kominfo bertugas untuk mengawasi dan menanggulangi konten negatif yang beredar di ruang digital, seperti hoaks, ujaran kebencian, dan perjudian online.
- **Pengembangan Industri Kreatif Digital:**
Kominfo mendukung pertumbuhan industri kreatif digital, termasuk pengembangan konten digital, animasi, dan permainan, untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian.

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kominfo ini diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yang terencana dalam Rencana Strategis Kominfo, yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

Dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah yang selaras dengan salah satu sasaran RPD Tahun 2024-2026 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis ditetapkan tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Diskominfo Provinsi Jawa Tengah yang merupakan perumusan fokus program dan kegiatan strategis.

Tujuan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah yaitu Meningkatkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang akan diwujudkan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya layanan dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Meningkatnya pelayanan data statistik sektoral dan geospasial;
- 3) Meningkatnya keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah digital Jawa Tengah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinkominfo

DINKOMINFO merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang

Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah. Pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dilakukan melalui misi ke-1, yaitu: Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel, dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kualitas pelayanan publik, indikator tujuan indeks reformasi birokrasi dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dengan indikator sasaran nilai sakiP.

Adapun urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika memiliki tujuan mewujudkan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* melalui pengembangan sistem pemerintah berbasis elektronik dengan sasaran:

1. Meningkatnya integrasi sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indikator sasaran indeks keterbukaan informasi publik dan meningkatnya pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi.
2. Meningkatnya ketersediaan data pada portal satu data daerah yang dapat diakses masyarakat dengan indikator sasaran persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah
3. Meningkatkan keamanan informasi dengan indikator sasaran tingkat keamanan informasi Pemerintah.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-3 terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinkominfo adalah mewujudkan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* melalui pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tujuan dan sasaran Dinkominfo Kabupaten Purbalingga selama lima tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 3.1. TARGET, REALISASI, DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 SEBELUM PERUBAHAN

N o	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Rata-rata capaian kinerja	Capaian kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	Mewujudkan Pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> melalui Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik		Indeks SPBE	Point	3,93	3,93	105,51 %	100%
		Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Point	96,20	94,92	97,31	98,68
		Meningkatnya ketersediaan Data pada portal satu data daerah yang dapat diakses masyarakat	Persentase kesediaan Data pada portal satu data daerah	Persen	100	100	100	100
		Meningkatnya Keamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Daerah	Persen	58,30	62,42	58,64	107,06
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan Dinkominfo		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	45	47	102,94	104,44
		Meningkatkan implementasi SAKIP Dinkominfo	Nilai SAKIP Dinkominfo	Indeks	72,75	72,76	102,68	101,01

Tabel 3.3. Target dan Pengukuran Penilaian Kinerja Dinkominfo Berdasarkan PK
Perubahan Tahun 2025

N o	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Targe t	Realis asi	Rata- rata capaian kinerja	Capaian kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	Mewujudkan transformasi digital pemerintah		Indeks Pemerintah Digital	Angka	1,5	0	0	0
		Meningkatnya layanan pemerintahan berbasis digital	Tingkat Kematangan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi dan Penggunaan Teknologi Baru	Persen	18,27	27,81	27,81	152,22%
		Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Angka	96,20	94,92	96,42	98,67%
		Meningkatnya publikasi data sektoral	Persentase Publikasi Data Statistik yang Tersusun	Persen	100	100	100%	100%
		Terwujudnya keamanan informasi pemerintah	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Persen	58,30	62,42	119,24%	107,06%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinkominfo	Nilai SAKIP	Angka	72,75	72,76	102,68%	100,01%

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.1 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Pembangunan daerah di Kabupaten Purbalingga yang akan dilaksanakan dalam lima tahun kedepan adalah penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga periode tahun 2025-2029. Agar dapat diimplementasikan dalam program dan kegiatan pembangunan daerah, Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut harus dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah, sebagai upaya dalam menjawab permasalahan pembangunan daerah yang masih dihadapi. Selain untuk menjawab permasalahan daerah, perumusan tujuan dan saran pembangunan juga memperhatikan perkembangan isu strategis nasional dan global, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), serta mempertimbangkan keberlanjutan program pembangunan yang berdampak positif untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah.

3.3.1.a. Visi

Visi pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029 merupakan implementasi dari Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga terpilih hasil Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024 dan terlantik pada tanggal 20 Februari tahun 2025. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dimaksud adalah **“AKSELERASI PEMBANGUNAN KOLABORATIF UNTUK PURBALINGGA MANDIRI DAN SEJAHTERA”**.

Visi tersebut berfokus pada percepatan pembangunan di berbagai sektor melalui kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, masyarakat dan sektor swasta untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan di Kabupaten Purbalingga. Makna yang termuat dalam Visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Purbalingga yang Mandiri adalah Purbalingga yang mampu sejajar dengan daerah lain dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri sehingga mampu bersaing dengan sehat didasari keyakinan akan potensi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perekonomian Kabupaten Purbalingga diharapkan menjadi tangguh untuk tumbuh dan bersaing dengan daerah lain terutama di Provinsi Jawa Tengah. Prinsip pembangunan didasarkan pada pertumbuhan (*growth*) sektor-sektor ekonomi yang menjadi unggulan daerah sebagai kekuatan. Melalui strategi dan inovasi yang diciptakan dan dikembangkan sendiri serta dengan upaya yang sungguh-sungguh pada Pembangunan ekonomi diharapkan ketergantungan terhadap pihak lain secara bertahap dapat dikurangi.
- b. Purbalingga yang Sejahtera adalah Purbalingga yang mampu memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat sebagai subjek pembangunan baik dalam pendidikan; kesehatan; perlindungan sosial; ketenteraman, ketertiban umum masyarakat serta ketahanan sosial budaya dan keluarga yang layak dan berkualitas serta hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat baik berdasarkan gender, suku/ras, agama maupun tingkat pendapatan sehingga memberikan kemakmuran bagi masyarakat.
- c. Purbalingga Kolaboratif adalah Purbalingga yang mampu membangun kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, masyarakat dan sektor swasta, dimana Pembangunan melibatkan berbagai untuk menciptakan kemitraan yang inklusif dalam rangka meningkatkan kualitas program dan kegiatan untuk mengatasi masalah publik yang kompleks. Pelaksanaan kerjasama dilakukan secara terbuka/akuntabel dan transparan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 V – 2 untuk melaksanakan kebijakan dan program publik bagi pemenuhan kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3.3.1.b. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029, telah ditetapkan Misi pembangunan daerah yaitu rumusan umum mengenai

upayaupaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi Bupati Purbalingga Terpilih tersebut adalah:

B-Bangkitkan Ekonomi Rakyat: Pemberdayaan ekonomi local melalui pengembangan UMKM dan modernisasi sektor pertanian

A-Akselerasi Pembangunan Infrastruktur: Peningkatan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas ekonomi

R-Reformasi Pelayanan Publik: Digitalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi

U-Unggulkan Kualitas Sumber Daya Manusia: Peningkatan kualitas Pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM yang unggul

Agar Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka Visi dan Misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029 meliputi 5 (lima) tujuan dan 11 (sebelas) sasaran, namun hanya Misi ketiga yang berkaitan dengan kinerja Dinkominfo Kabupaten Purbalingga yang diuraikan sebagai berikut:

Misi 3: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Untuk mewujudkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik yang implementasinya diwujudkan dengan menerapkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tatakelola pemerintahan yang bersih dan transparan diwujudkan melalui dukungan aparatur pemerintahan yang memadai, tata manajemen pengelolaan pemerintahan yang efektif, struktur organisasi yang efisien, serta sikap dan perilaku aparatur yang baik. Sedangkan responsif diwujudkan melalui pelibatan kontribusi serta perkuatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Pelayanan publik dan reformasi birokrasi tersebut juga harus berbasis inovasi dan teknologi yang mengikuti perkembangan zaman karena digitalisasi layanan publik akan mampu mempermudah efisiensi dan aksesibilitas pelayanan pemerintah bagi masyarakat. Reformasi birokrasi juga dapat berkontribusi pada peningkatan kemandirian fiskal daerah karena dengan dukungan aparatur negara yang berkualitas dapat membantu daerah dalam mengelola keuangan daerah serta membantu daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-3 adalah: Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Inovatif dan Agile, dengan sasaran:

1. Meningkatnya birokrasi yang inovatif, prima dan berkontribusi optimal terhadap pembangunan;
2. Meningkatnya kemandirian fiskal daerah;
3. Meningkatnya desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu dinas

daerah yang merupakan satu kesatuan sistem pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sudah barang tentu mempunyai tanggung jawab untuk terwujudnya visi dan misi daerah, dalam rangka turut berperan serta mewujudkan visi Kabupaten Purbalingga.

Salah satu tujuan misi ini yang berkaitan dengan fungsi Dinkominfo yaitu meningkatkan kualitas dan keterbukaan informasi publik, dengan sasaran meningkatnya implementasi e-Government dan keterbukaan informasi publik.

3.3.2 *Sustainable Development Goals /SDGs*

Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi tujuan pembangunan yang disepakati negara Anggota PBB. Terdapat 169 capaian yang terukur dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Salah satu tujuan dalam SGD's adalah pendidikan, namun di masa pandemi Covid-19, pendidikan sebagaimana sektor lainnya mengalami turbulensi. Untuk mewujudkan SDGs, saat ini Pemerintah tengah membangun tiga layer infrastruktur, aplikasi, dan literasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

*** INFRASTRUKTUR**

Pemerintah harus menjamin bahwa seluruh infrastruktur telekomunikasi bisa menjangkau pelosok tanah air di daerah-daerah pedesaan, rural, dsb. Presiden menyampaikan Lima Percepatan Transformasi Digital dan salah satunya adalah untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

Infrastruktur yang dikelola Dinkominfo Kabupaten Purbalingga diantaranya:

- ▶ **Dinkominfo Data Center** yang terletak di SETDA Purbalingga. Server 2U/1U total 8 unit dengan kapasitas hingga 100 vcpu.
- ▶ **Pusat Data Nasional** yang merupakan Fasilitas Cloud Pemerintah milik Kementrian Kominfo untuk Tenant Pemkab-Purbalingga dimana memiliki kapasitas hingga **57 VM/Server (virtual machine), CPU: 127 GHz, RAM: 208 GB dan Storage: 10,1 TB.**
- ▶ **Pusat Data Provinsi** merupakan Fasilitas cloud milik Pemprov Jateng untuk Pemkab Purbalingga dimana memiliki kapasitas **8 VM/Server, CPU: 54 Core, RAM: 80GB dan Storage: 1,8 TB**
- ▶ Jaringan : a. Jaringan Metro ke beberapa OPD.
 - b. IP Publik hingga /23 (510 IP Public)
 - c. Perangkat Jaringan Highend:
 - 1) RouterCore
 - 2) Switch
 - 3) Access Point
 - 4) Repeater
 - 5) Zabbix monitoring
 - 6) OLT Fiber optik

Dalam infrastruktur yang dikelola, Dinkominfo Kabupaten Purbalingga juga mengembangkan SID Desa & desa.id di desa-desa se-Kabupaten Purbalingga. Presentase Capaian Penerapan SID Desa dan desa.id Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

1. SID Desa,
Jumlah Desa yang sudah menerapkan SID adalah **78** dari total 224 desa di Kabupaten Purbalingga, atau sekitar 34,82%.
2. Presentase Update SID,
Jumlah SID yang aktif mengupdate datanya adalah **46** dari total 78 SID di Kabupaten Purbalingga, atau sekitar 58,97%.
3. desa.id,
Jumlah Desa yang sudah menerapkan desa.id adalah **126** dari total 224 desa di Kabupaten Purbalingga, atau sekitar 56,25%.
4. Presentase Update desa.id,
Jumlah desa.id yang aktif mengupdate datanya adalah **51** dari total 126 desa.id di Kabupaten Purbalingga, atau sekitar 40,47%.

• **APLIKASI**

Aplikasi yang sudah dibuat Dinkominfo Kabupaten Purbalingga di tahun 2023 dijelaskan berikut ini:

Tabel 3.2
Aplikasi yang sudah dibuat Dinkominfo Kabupaten Purbalingga di tahun 2023

NO	APLIKASI	Tahapan	Keterangan
1	Pamuraja/Gaspol Uapike	Selesai	
2	Silakonbima	Selesai	
3	Satset	Selesai	
4	Alpukat	Selesai	
5	Siregol	Selesai	
6	JDIH Mobile	Selesai	
7	Si Pakis Bangsa	Selesai	
8	Purbalingga Juara	Selesai	
9	Monata	Selesai	
10	Sang Pentolan	Selesai	
11	Siska Pedes	Selesai	
12	Simpandata	Selesai	
13	E-akun	Selesai	
14	Satu Data Pendidikan dan Kebudayaan	Proses	• mou dg kemendikbud pusdatin pengembangan aplikasi 2024 instal server di Dindikbud

15	Pengembangan JDIH	Proses	• Link anggota-anggota JDIH di website JDIH • Penambahan link JDIH di Sub domain website OPD (Fikri) • Selasa 9 januari 2024 koordinasi dengan bagian hukum
16	Sipetarung	Proses	• reviu terakhir tgl 4 dan 7 desember 2023 dan sudah ditindaklanjuti, kurang fitur import koordinat • Selesai analisis tahap 3 oleh kepala bidang • pengesahan dengan TTE, menunggu penyesuaian sesuai kriteria di aplikasi terlebih dahulu
17	E-cuti	Proses	awal tahun 2024 sudah diujicobakan untuk cuti tahunan
18	Pesona	Proses	• backend sudah selesai • frontend kurang modul cetak (luthfi) • Domain belum dibuat • minio sudah jadi
19	E-Sakip	Proses	• Koordinasi dengan bappelitbangda
20	TJSLP	Proses	• Halaman depan sudah dibuat • User perusahaan belum dibuat
21	Simply-KS	Antrian	
22	Sinta Lan Rama	Antrian	
23	Sistem Informasi Pengajuan Penyaluran DD	Antrian	

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga memprioritaskan pembangunan yang diwujudkan dalam program-program kegiatan yang terdiri dari 5 program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Guna memperlancar pelaksanaan program dan sasaran tersebut di atas, maka dilaksanakan 14 kegiatan dan 37 sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pengelolaan E-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan, situasi, dan kondisi serta adanya isu strategis yang harus dijalankan, maka di tahun anggaran 2025 dimunculkan beberapa sub kegiatan baru yang tadinya belum muncul. Diantara Sub Kegiatan yang baru muncul tersebut adalah:

1. Sub kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini dimunculkan karena adanya kebutuhan mendesak peralatan scan untuk menunjang kegiatan keuangan dan lainnya.

2. Sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas dan sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE. Sub kegiatan ini dimunculkan karena sangat diperlukan dalam menunjang kegiatan yang berkaitan dengan *Smart City*.
3. Sub kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral sesuai Standar. Sub kegiatan ini dimunculkan untuk mengantisipasi dua sub kegiatan yang belum terakomodir di SIPD RI yaitu Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral dan Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur.

Gambaran lengkap dari program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut di atas dalam tabel di bawah ini:

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Progam dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Perkiraan Maju Perubahan Tahun 2025
Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Rencana Tahun)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Perubahan Tahun 2025	
		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Murni Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Perubahan Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Presentase OPD yang memiliki website aktif	Purbalingga	100%	875.277.000	DAU		100%	868.497.000
2.16.02.2.201	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	100%	875.277.000	DAU		100%	868.497.000
2.16.02.2.201.005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Purbalingga	12	471.528.000	DAU	Pergeseran dari Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	12	467.244.000
2.16.02.2.201.006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Purbalingga	19	357.985.000	DAU		16	366.985.000
2.16.02.2.201.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Purbalingga	11	20.000.000	DAU		41	12.155.000
2.16.02.2.201.00120	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Purbalingga	14	25.764.000	DAU		14	22.113.000
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan Pelayanan Publik yang menggunakan aplikasi informatika	Purbalingga	100%	1.176.986.000	DAU		100%	1.167.225.000
2.16.03.2.02.	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks SPBE	Purbalingga	3.93	1.156.986.000	DAU		55	1.148.125.000
2.16.03.2.02.0007	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintahan Daerah	Purbalingga	12	121.508.000	DAU		12	111.702.000

2.16.03.2.02.0009	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Purbalingga	30	1.035.478.000	DAU		1	1.036.423.000
2.16.03.2.01.	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nama Domain dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terkelola	Purbalingga	1	.20.000.000	DAU		55	19.100.000
2.16.03.2.01.0002	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Purbalingga	1	20.000.000	DAU		121	19.100.000
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Presentase OPD yang menyediakan dan mengupdate data sektoral sesuai standar	Purbalingga	100%	76.068.000	DAU		100%	47.223.000
2.20.02.2.01.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menyediakan dan mengupdate data Sektoral sesuai standar	Purbalingga	100%	76.068.000	DAU		100%	47.223.000
2.20.02.2.01.0001	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan Statistik Sektoral yang telah dilengkapi Metadata	Purbalingga	27	52.949.000	DAU	Penggabungan dari Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral dan Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur	1	31.934.000
2.20.02.2.01.0003	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Purbalingga	27	23.119.000	DAU	Menjadi Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	0	15.289.000
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Purbalingga	100%	49.148.000	DAU		100%	31.459.000
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase operasional jaring komunikasi Pemerintah Daerah	Purbalingga	100%	33.208.000	DAU		100%	20.739.000
2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan jarring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	1	16.604.000	DAU		1	10.402.000
2.21.02.2.01.0002	Penatalaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	1	16.604.000	DAU		2	10.337.000
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase operasional jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah	Purbalingga	100%	15.940.000	DAU		100%	10.720.000
2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	Purbalingga	1	15.940.000	DAU		1	10.720.000
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	'Sasaran 1: Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, dengan indikator kinerja: Persentase dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan. Sasaran 2: Terselesaikannya tindak lanjut temuan pengelolaan anggaran sesuai ketentuan, dengan	Purbalingga	100%	6.229.560.000	DAU		100%	6.089.560.000

2.16.01.2.06	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Purbalingga	6	1.992.000	DAU		1	1.885.000
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Tersusun	Purbalingga	100%	1.992.000	DAU		100%	1.970.000
2.16.01.2.0006	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Purbalingga	12	1.992.000	DAU		4	1.970.000
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Purbalingga	100%	554.377.000	DAU		100%	473.677.000
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	Purbalingga	1	323.000	DAU		2	323.000
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Purbalingga	12	55.374.000	DAU		12	55.374.000
2.16.01.2.0808	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Purbalingga	1	1.000.000	DAU		1	1.000.000
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Purbalingga	12	497.680.000	DAU		12	416.980.000
2.16.01.2.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Purbalingga	100%	55.000.000	DAU		100%	55.000.000
2.16.01.2.01.0001	Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Purbalingga	1	55.000.000	DAU	mendapat geseran dari Sub Kegiatan Logistik senilai Rp 10 juta untuk membeli Alat Scanner	1	55.000.000
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	Purbalingga	100%	131.683.000	DAU		100%	131.683.000
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Purbalingga	13	126.192.000	DAU		13	126.192.000
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Purbalingga	6	3.491.000	DAU		6	3.491.000
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas	Purbalingga	1	2.000.000	DAU		1	2.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) didukung pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

Rumusan program dan kegiatan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 dan perkiraan maju anggaran pada Tahun 2027 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
MATRIKS RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2026

Kode	Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun n+1				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun n+2	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16	Urusan Komunikasi dan Informasi				Dinkominfo Purbalingga						
2.16.02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase OPD yang Menyediakan Informasi Publik Secara up to date di Portal Daerah	Dinkominfo Purbalingga	17,34%	801.172.000	DAU		18,08%	841.231.000,00
2.16.02.2.201			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Media Komunikasi Publik (Radio, Website, Medsos, Media Luar Ruang) Milik Pemerintah Daerah yang Dikelola Maupun Dimanfaatkan	Dinkominfo Purbalingga	100%	801.172.000	DAU		18,08	841.231.000,00
2.16.03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Aplikasi yang Dikelola	Dinkominfo Purbalingga	81%	1.037.318.000	DAU		82%	1.194.184.000,00

2.16.03.2.01.			Kegiatan: Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nama Domain, Sub Domain dan Domain Pemerintah Desa yang dikelola	Dinkominfo Purbalingga	498 Domain dan Sub Domain	17.710.000	DAU		551	19.481.110,00
2.16.03.2.02.			Kegiatan: Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks SPBE	Dinkominfo Purbalingga	283 Layanan	1.019.608.000	DAU		284	1.174.702.890,00
2.20	Urusan Statistik				Dinkominfo Purbalingga						
2.20.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			Dinkominfo Purbalingga	100%	47.225.000	DAU		100%	49.586.000,00
2.20.02.2.01.			Kegiatan: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menyediakan dan mengupdate data sektoral sesuai standar serta cakupan ketersediaan data dasar Pembangunan	Dinkominfo Purbalingga	98,80%	47.225.000	DAU		98,98%	49.586.000,00
2.21	Urusan Persandian				Dinkominfo Purbalingga						
2.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			Dinkominfo Purbalingga	574 Angka	31.454.000	DAU		575 Angka	33.027.000,00

2.21.02.2.01			Kegiatan: Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase operasional jaring komunikasi Pemerintah Daerah	Dinkominfo Purbalingga	74,5 Angka	31.454.000	DAU		75 Angka	33.027.000,00
01.16.00	Urusan Komunikasi dan Informasi				Dinkominfo Purbalingga						
1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Dinkominfo Purbalingga	100%	6.456.985.000	DAU & DBHCHT		100%	6.784.368.000,00
1.01.01.2.01			Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dinkominfo Purbalingga	100%	2.599.000	DAU		100%	3.144.790,00
1.01.01.2.02			Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Dinkominfo Purbalingga	100%	5.357.571.000	DAU		100%	5.559.313.510,00
1.01.01.2.03			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Pemerintaha Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dinkominfo Purbalingga	100%	1.972.000	DAU		100%	2.169.200,00
1.01.01.2.05			Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian	Dinkominfo Purbalingga	100%	116.000.000	DAU & DBHCHT		100%	102.850.000,00
1.01.01.2.06			Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	Dinkominfo Purbalingga	100%	34.598.000	DAU		100%	27.277.800,00

1.01.01.2.07			Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinkominfo Purbalingga	100%	108.000.000	DAU		100%	114.946.700,00
1.01.01.2.08			Kegiatan: Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Dinkominfo Purbalingga	100%	503.876.000	DAU		100%	609.814.700,00
1.01.01.2.09			Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Dinkominfo Purbalingga	100%	131.683.000	DAU		100%	364.851.300,00

BAB V

PENUTUP

Kebijakan dan program yang dituangkan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) tahun 2027 diharapkan dapat dilaksanakan secara optimal dan mencapai sasaran, dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Keberhasilan pelaksanaannya akan sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak, terutama seluruh pejabat di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Purbalingga.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2027 Dinkominfo Kabupaten Purbalingga, didasarkan pada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan berbagai kebijakan umum pembangunan Kominfo, Persandian serta Statistik dengan memperhatikan berbagai perkembangan isu-isu terutama dalam mendukung pelayanan pemerintah daerah berbasis elektronik dan perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal.

Rancangan Awal Renja Tahun 2027 Dinkominfo fokus pada penguatan integrasi TIK karena didorong oleh perkembangan TIK global yang mendorong kebutuhan teknologi digital sangat penting, dimana salah satunya melalui pembangunan pusat data (*Data Center*). Hal ini menjadi bagian penting yang terpadu dan tersinkronisasi dalam arah pembangunan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi rencana kegiatan dalam Rancangan Awal Renja Tahun 2027 telah dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan, belum menempuh Forum OPD dan Forum gabungan OPD serta Musrenbang Kabupaten.

Rancangan Awal Renja Tahun 2027 merupakan acuan bagi Dinkominfo Kabupaten Purbalingga dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam pembangunan sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, sehubungan dengan hal tersebut maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Rancangan Awal Renja Tahun 2027 sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai dilingkungan Dinkominfo termasuk masyarakat dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program program dan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Awal Renja Tahun 2027 dengan sebaik-baiknya.
2. Rancangan Awal Renja Tahun 2027 menjadi acuan dan pedoman bagi pejabat di lingkungan Dinkominfo dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun pelayanan umum, dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2027.

3. Masyarakat Luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
4. Pada akhir tahun anggaran 2026. Setiap bidang wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.
5. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap kepala bidang wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rancangan Rancangan Awal Renja Tahun 2027 yang disusun dengan mekanisme perencanaan yang komprehensif dan terpadu, serta adanya dukungan seluruh jajaran pejabat dan pegawai di internal Diskominfo beserta seluruh pemangku kepentingan terkait, diharapkan langkah-langkah pencapaian kinerja dapat lebih *agile* dan tepat sasaran, sehingga kinerja Dinkominfo Kabupaten Purbalingga dapat semakin fokus dalam menyelesaikan berbagai permasalahan aktual dan mencapai *outcome* yang diharapkan.

Purbalingga, 14 Agustus 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

R. BUDI SETIAWAN, S.E., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19750417 202001 1 011